



**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PARTISIPASI PEMILIH  
PADA PEMILU 2019 DI PROVINSI RIAU**

**KERJASAMA KOMISI PEMILIH UMUM (KPU)  
PROVINSI RIAU  
DENGAN  
LEMBAGA KAJIAN SOSIAL POLITIK  
KONTEMPORER (LKSPK)  
2019**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PARTISIPASI PEMILIH**

**PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

**DI PROVINSI RIAU**

**TIM PENELITI**

**Dr. Hasanuddin, M.Si**

**Drs. Ishak, M.Si**

**Anas Rizaldi, S.Ip.,MA.**

**Idris, S.Ip**

**Rozi, S.Kom**

**KERJASAMA KOMISI PEMILIH UMUM (KPU)**

**PROVINSI RIAU**

**DENGAN**

**LEMBAGA KAJIAN SOSIAL POLITIK**

**KONTEMPORER (LKSPK)**

**2019**

## Abstrak

Pemilu tahun 2019 telah usai dengan berbagai dinamika yang mengiringi. Salah satu yang mencuat kepermukaan yaitu terjadi peningkatan persentase partisipasi pemilih dalam skala nasional yaitu menyentuh angka 81 persen dan ini melebihi target nasional sebesar 77,5 persen. Tidak hanya sampai disitu, peningkatan partisipasi pemilih juga menular hingga di berbagai pelosok negeri, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Angka partisipasi pemilih di provinsi Riau menyentuh angka 78 persen melebihi target yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi Riau sebesar 75 persen. Menjadi menarik kemudian adalah jika kita melihat persentase partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 silam, angka persentase pemilih hanya berkisar pada angka 50-60 persen. Dinamika fluktuasi partisipasi pemilih di Provinsi Riau menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, pada titik inilah penelitian ini dilakukan guna melacak penyebab terjadinya perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada dua momen kontestasi politik elektoral di Provinsi Riau. Selain itu, temuan angka surat suara tidak sah juga menjadi perhatian karena di beberapa wilayah angka surat suara tidak sah ditemukan tinggi.

Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam menganalisis tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, perbandingan persentase partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018 di provinsi Riau, serta melacak penyebab surat suara tidak sah, maka penelitian ini dikawal oleh logika teoritik partisipasi pemilih dan konsep *protest voting*. Dengan demikian, operasionalisasi teoritik akan dipandu melalui metode *mix-method* yang menitik beratkan pada metode kualitatif, untuk tipe penelitian nantinya menggunakan tipe *causal comparative research*. Oleh karena itu, melalui kerangka fikir inilah diharapkan penelitian ini mendapatkan jawaban yang tepat dan akurat.

Melalui proses penelitian lapangan dan akurasi dalam membaca data serta ketajaman analisis, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 memang terjadi, meskipun perbedaan partisipasi pada setiap jenis pemilihan tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan pemilu 2019 dilakukan secara serentak, sehingga partisipasi pemilih pada jenis pemilihan yang lain (seperti DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi) ikut terbantu oleh antusiasme masyarakat dalam memberi hak suara pada jenis pemilihan presiden dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 karena faktor peran aktif penyelenggara pemilu, gaung politik dan peran media massa. *Kedua*, jika dibandingkan dengan Pilkada Riau 2018, selain gaung politik yang kurang, rendahnya partisipasi pemilih juga disebabkan oleh para kandidat dan tim pemenang tidak terjun langsung hingga ke desa-desa, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengenal sosok kandidat yang akan dipilih dalam Pilkada. *Ketiga*, sehubungan dengan surat suara tidak sah, terdapat dua pola umum yang ditemukan yaitu pola pencoblosan ganda dan pola surat suara kosong, ini kemudian bisa dibaca sebagai kurangnya pemahaman pemilih tentang mekanisme pencoblosan dalam Pemilu atau bagian dari ekspresi para pemilih (*protest voting*).

Hasil dari penelitian ini membawa refleksi teoritik, bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh adanya faktor perangsang terhadap lingkungan sosial dan politik. Sehingga, angka partisipasi akan tinggi jika daya rangsang bekerja maksimal dan cenderung menurun angka partisipasi ketika gaung politik tidak begitu bergairah.

Kata kunci: Partisipasi pemilih, Pemilihan Umum, Persentase, *Protest Voting*.

## Kata Pengantar

Penelitian mengenai “Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau” ini terselenggara berkat kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dengan Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK). Semangat awal tentu saja berangkat dari kepedulian terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin bergairah dalam perkembangannya, terutama berkaitan dengan pembangunan demokrasi elektoral. Sama dengan KPU Riau, Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK), sebagai lembaga yang selama ini aktif dalam berbagai diskusi tematik sosial dan politik melalui forum-forum diskusi maupun kajian yang mendalam terutama dalam konteks politik lokal di provinsi Riau memandang evaluasi terhadap partisipasi pemilih penting untuk dilakukan. Terlebih melihat dinamika sosial-politik yang begitu dinamis pada ranah politik lokal, mendorong kami semakin bersemangat dalam melakukan *mapping* berbagai hal, terutama berkenaan dengan dinamika politik elektoral. Hemat kami, selama ini dinamika politik elektoral di ranah lokal begitu dinamis tetapi disisi lain terkadang cenderung stagnan. Terlebih dalam kasus kontestasi politik, partisipasi pemilih menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Dimana partisipasi pemilih tinggi pada suatu momen elektoral maka keabsahan (*Legitimacy*) politik-pun menjadi kuat. Menjadi menarik jika melihat tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Riau pada beberapa momen elektoral terjadi fluktuasi angka partisipasi pemilih. Pada kontestasi Pilkada Riau tahun 2018 misalnya, tingkat partisipasi pemilih pada perhelatan ini cukup memprihatinkan, dimana partisipasi pemilih hanya berkisar pada angka 51-62 persen saja, bahkan angka tersebut belum melampaui target partisipasi yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi Riau. Berbeda halnya dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka rata-rata 78 persen. Pada titik inilah kami mencoba untuk melacak lebih jauh akar penyebab curamnya perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada dua momentum elektoral tersebut. Hasil dari kajian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi segenap pegiat pembangunan politik elektoral, terutama bagi pihak penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk tujuan tersebut, maka pelibatan berbagai pihak dilakukan dalam memperoleh data baik berupa data base maupun data penelitian langsung di lapangan, mulai dari mengumpulkan data kuantitatif dari lembaga penyelenggara pemilu, berita dari media massa hingga wawancara langsung dengan pelaku politik elektoral di akar rumput. Melalui metode ini kemudian di analisis secara mendalam berdasarkan pijakan teoritis agar mampu

menghasilkan suatu jawaban yang kuat dan berdasar. Sehingga dari hasil kajian ini diharapkan mampu memberi jawaban atas persoalan dan dinamika yang terjadi selama ini dalam konteks fluktuatifnya partisipasi pemilih pada politik elektoral di Provinsi Riau.

Dengan latar belakang ini pula, maka penelitian ini diberikan judul “Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau”. Dalam hasil penelitian ini, kami juga turut melaporkan beberapa hal berkenaan dengan potret partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di provinsi Riau, perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 di provinsi Riau, dan tidak luput juga kami sedikit menyinggung tentang temuan surat suara tidak sah dalam pemilu 2019 yang lalu. Dengan demikian, harapan bahwa hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama berkenaan dengan pembangunan politik elektoral di provinsi Riau dan Indonesia secara umum.

Hasil kajian ini tentu tidak terlepas dari kiprah banyak pihak yang tentu kami perlu memberikan apresiasi yang tinggi. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau baik pihak komisioner maupun pihak sekretariat yang telah memberi kesempatan dan menaruh kepercayaan kepada kami untuk melakukan tugas riset ini. Selain itu, keterlibatan aktif dari semua informan penelitian (dari PPK dan KPPS di Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu) juga kami mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada bapak H. Asril, mas Perdiman, mas Agus Nedi, pak Jamil, Dewi, Ali, mas Gunardi, pak Arhipen Yapatra, bang Hotman, Ambok Angka, Rio, Januardi, Suriadi dan pak Amin.

Akhir kata, hanya Tuhan-lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan yang membangun sangat diperlukan dalam pengembangan dan penguatan politik elektoral kedepan. Semoga kegiatan ini ikut memberi sumbangsih terhadap pembangunan demokrasi electoral dan menjadi penguatan jalan LKSPK dalam menapaki perbincangan akademik ke depan.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Tim Peneliti LKSPK

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b>	ii
<b>Kata Pengantar</b>	iii
<b>Daftar Isi</b>	iv
<b>Daftar Tabel</b>	v
<b>Daftar Grafik</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
<b>II. TINJAUAN TEORI</b>	7
A. Landasan Teori	7
1. Partisipasi Politik	7
2. <i>Voting</i> dalam Pemilu	11
3. Suara Tidak Sah dalam Pemilu	12
B. Hipotesis Penelitian	15
<b>III. METODE KAJIAN</b>	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Pengumpulan Data dan Informan Penelitian	18
C. Analisis Data	18
<b>IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN</b>	19
A. Gambaran Umum	19
B. Deskripsi Hasil Penelitian	22
1. Partisipasi Pemilu 2019 di Provinsi Riau	22
2. Perbandingan Partisipasi Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018 di Provinsi Riau	29
2.1 Peran Penyelenggara Pemilu	33
2.2 Gaung Politik	34
2.3 Peran Media Massa	37
3. Suara Tidak Sah pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau	40
3.1 Pola Pencoblosan Ganda pada Surat Suara	44
3.2 Pola Surat Suara Kosong	45
3.3 Surat Suara tidak sah: Bentuk <i>Protest Voting</i>	47
C. Argumentasi Teoritis	48
<b>V PENUTUP</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>52</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau	23
Tabel 2	Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Provinsi Riau	30
Tabel 3	Daftar Persentase Suara tidak sah pada Pemilu 2019	41

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau	24
Grafik 2	Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Provinsi Riau	31
Grafik 3	Perbandingan Surat Suara tidak sah pada Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019	42

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden telah usai. Penyelenggaraan pemilu kali ini sangat menguras energi semua kalangan. Bagaimana tidak, pemilu 2019 kali ini merupakan pemilu terbesar sepanjang sejarah perhelatan politik elektoral di Indonesia. Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan Anggota Legislatif dari berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan anggota DPRD (provinsi dan Kabupaten/Kota), DPR RI serta DPD. Di samping itu, pemilu 2019 merupakan pemilu yang penuh dengan dinamika sejak digaungkan tahun 2018 sebagai awal tahun politik. Mulai dari terjadi pembelahan sikap politik di kalangan elit nasional hingga ke daerah dan diikuti oleh perpecahan di kalangan masyarakat akibat beda pilihan politik. Belum lagi fenomena jatuhnya korban jiwa dari panitia pelaksana pemilu yang menyentuh angka ratusan jiwa yang banyak diasumsikan diakibatkan faktor kelelahan. Pemilu kali ini meninggalkan banyak cerita dan catatan untuk dijadikan pembelajaran.

Pemilu tahun 2019 begitu bergairah karena menyedot perhatian masyarakat banyak. Ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 mencapai 199.987.870 orang dan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 158.012.506 orang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyebutkan bahwa angka partisipasi pemilih pada pemilu kali ini menyentuh angka 81 persen, ini melebihi target nasional partisipasi pemilih yaitu 77,5 persen. Jika dibandingkan dengan

pelaksanaan pemilu tahun 2014 silam, maka penambahan tingkat partisipasi berkisar 10 persen.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari riwayat penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1999 hingga sekarang, maka tren partisipasi pemilih mengalami peningkatan meskipun situasinya sedikit fluktuatif. Misalnya, pemilu tahun 1999 tingkat partisipasi pemilih pada Pileg sebesar 92,99 persen, pada pemilu tahun 2004 untuk Pileg tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi 84 persen dan untuk Pilpres pada tahun yang sama menyentuh angka 79,76 persen (putaran pertama) dan 74,44 persen (putaran kedua). Kemudian pada pemilu tahun 2009, partisipasi pemilih untuk Pileg berkisar 70,99 persen, diikuti 72,09 persen untuk partisipasi pemilihan pada Pilpres. Sedangkan pada tahun 2014 silam, tingkat partisipasi pemilih dalam Pileg semakin meningkat menjadi 75,11 persen dan untuk Pilpres menjadi 69,58 persen. Untuk pemilu tahun 2019 ini tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 81,69 persen untuk Pileg dan 81,97 persen untuk Pilpres.<sup>2</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa benar pernah terjadi fluktuatif angka persentase pemilih pada periode pemilu tahun 1999 ke pemilu 2004, namun setelah itu angka persentase partisipasi pemilih mengalami peningkatan.

Adalah benar bahwa persentase partisipasi pemilih dalam pemilu ditingkat nasional mengalami peningkatan.. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan tingkat partisipasi di tingkat lokal (daerah). Untuk wilayah provinsi Riau, tingkat partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan dari pemilu-pemilu sebelumnya dan bahkan peningkatan partisipasi pemilih terjadi di semua tingkat Kabupaten/Kota. Pada Pemilu kali ini tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka rata-rata yaitu 78 persen, dan ini melebihi dari target yang telah ditentukan oleh KPU provinsi Riau (75%). Bahkan partisipasi pemilih di Riau pada Pemilu

---

<sup>1</sup>Lihat <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>

<sup>2</sup>Lihat <https://www.google.com/amp/s/www.medcom.id/amp/1bVyM1N-partisipasi-pemilih-meningkat-drastis-di-pemilu-2019>

tahun 2019 juga melewati capaian partisipasi pemilih pada saat Pilpres tahun 2014 silam yang hanya mencapai 62,73 persen (riau.antaranews.com).<sup>3</sup>

Sejatinya meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di provinsi Riau juga terjadi pada semua level pemilihan baik itu Pilpres maupun pemilihan Anggota Legislatif (DPD, DPR RI, DPRD). Bahkan peningkatan partisipasi pemilih terjadi diseluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau. Memang persentase perbedaan peningkatan partisipasi pemilih tidak begitu signifikan terjadi antara partisipasi pemilihan pada Pilpres maupun Pemilu Legislatif. Berdasarkan data dari KPU Riau, beberapa kabupaten/kota yang memiliki angka persentase tinggi menyentuh angka 80 persen lebih, diantaranya Kota Dumai, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi.

Perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 silam antar setiap level pemilihan juga menarik ditelaah. Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU provinsi Riau, untuk partisipasi pemilih pada level Pilpres sedikit lebih tinggi daripada Pemilu Legislatif. Hal ini bisa saja terjadi karena masyarakat lebih antusias dengan Pilpres dibandingkan dengan memilih anggota legislatif, tentu saja ada faktor lain yang mampu menjelaskan fenomena tersebut. Faktor rangsangan melalui media massa dirasa juga menjadi salah satu penyebab terjadi perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada setiap level pemilihan.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 menjadi menarik jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 silam. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Riau yang hanya 58 persen (untuk tingkat nasional termasuk kelompok terendah bersama dengan provinsi Kalimantan Timur). Seperti kita ketahui

---

<sup>3</sup>Lihat lebih lanjut di <https://riau.antaranews.com/berita/118082/partisipasi-pemilu-2019-di-riau-capai-78-persen>

bersama, tingkat partisipasi pada Pilkada serentak tahun 2018 silam yang tertinggi terjadi di provinsi Papua yang menyentuh angka 84 persen.<sup>4</sup>

Perbedaan angka partisipasi pemilih di dua momentum pemilihan tersebut, kemudian menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh dan mendalam. Karena perhelatan politik elektoral hanya berselang setahun antara Pilkada Riau tahun 2018 dengan pelaksanaan pemilu 2019 skala nasional. Diferensiasi angka partisipasi pemilih pada momen politik yang berbeda menjadi penting untuk dikaji dengan seksama terutama perihal faktor penyebabnya. Oleh karena itu, pada titik inilah kajian ini dilakukan untuk melihat penyebab terjadi perbedaan partisipasi pemilih di provinsi Riau pada perhelatan Pilkada tahun 2018 dan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang lalu (mulai dari Pilpres dan Pileg).

Selain partisipasi pemilih yang meningkat, menarik juga jika kita lihat fenomena surat suara tidak sah pada pemilu 2019 di provinsi Riau. Perlu untuk dilihat juga gejala penyebab surat suara tidak sah yang terjadi di beberapa wilayah pemilihan. Mengingat jumlah surat suara tidak sah juga bervariasi antar tingkatan level pemilihan pada Pemilu 2019. Data KPU Riau menunjukkan beberapa Kabupaten/Kota tercatat menyumbang angka surat suara tidak sah yang tinggi seperti Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir. Angka persentase mencapai 2,19 persen untuk level pemilihan presiden di Kabupaten Kepulauan Meranti dan 2,85 persen untuk level pemilihan yang sama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Suara tidak sah tentu saja bisa dilacak asal-usul penyebabnya. Berkenaan dengan itu, setidaknya kita bisa melihat pola seperti apa yang terjadi pada surat suara tidak sah tersebut. Surat suara tidak sah bisa saja terjadi karena ketidaktahuan pemilih pada cara menggunakan hak suara. Kemudian terdapat pula kecenderungan surat suara tidak sah terkait dengan

---

<sup>4</sup>Lihat di <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/12/23504431/persentase-partisipasi-pilkada-2019-papua-tertinggi-riau-dan-kaltim-terendah>

*electoral malpractice*, dan juga bisa terjadi akibat akumulasi dari ekspresi politik pemilih (*protest voting*).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, melacak perbandingan surat suara tidak sah serta melihat faktor penyebab juga menjadi suatu hal yang penting untuk dijadikan *asesmen* pembangunan demokrasi elektoral di Indonesia. Mengingat angka persentase suara tidak sah yang tinggi di beberapa Kabupaten/Kota di Riau dan terjadi pada hampir semua level pemilihan (pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD) pada Pemilu 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD? Jika perbedaan signifikan, apa penyebabnya?
2. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada Riau 2018? Jika ada perbedaan signifikan, apa penyebabnya?
3. Berapa jumlah surat suara yang tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah ingin melihat:

1. Perbandingan tingkat partisipasi pemilih di Riau pada Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD dan faktor – faktor penyebab perbedaan yang signifikan tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD.

---

<sup>5</sup>Ghafar Karim, Abdul, dkk. Laporan Akhir Penelitian “*Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Yogyakarta: PolGov, 2016)

2. Perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada Riau 2018. Serta ingin melihat penyebab perbedaan yang signifikan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada Riau 2018.
3. Perbandingan jumlah surat suara tidak sah pada Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD pada Pemilu 2019 dan faktor – faktor penyebab adanya suara tidak sah pada Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini nantinya, diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembangunan politik elektoral di Indonesia. Manfaat lain bisa sebagai pembaharuan data dan pijakan analisis, terutama bagi pihak penyelenggara Pemilu, para LSM, pegiat demokrasi dan para akademisi serta khalayak umum.

## II. TINJAUN TEORI

### A. Landasan Teori

Untuk menjawab apa yang ingin diteliti berkenaan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu, maka terlebih dahulu kita melihat makna dasar dari kata partisipasi itu sendiri. Ini bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir akan makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi diartikan sebagai perihal turut berperan sertadalam suatu kegiatan, keikutsertaan (peran serta). Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Politik<sup>6</sup>, partisipasi dengan kata lain yaitu “keterlibatan”. Dalam konteks demokrasi maka keterlibatan dapat berarti hak memilih, atau hak untuk didengar, atau hak untuk memutuskan persoalan-persoalan otonom dan terbatas, atau hak veto, hak perwakilan, delegasi atau mandat.

Sehubungan penelitian ini berkenaan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu, maka tinjauan teoritik yang akan digunakan ialah teori partisipasi politik. Tujuan dari tinjauan teori ialah agar dalam tahapan proses penelitian nanti teorisasi bisa menjadi acuan serta landasan dalam membangun kerangka pikir serta argumentasi.

#### 1. Partisipasi Politik

Mengenai partisipasi politik, Afan Gaffar mencoba untuk menggambarkan bahwa peran serta masyarakat merupakan kata lain dari istilah standar dalam studi ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Dalam studi ilmu politik, partisipasi politik masyarakat biasanya bersumber pada basis-basis sosial politik tertentu seperti *Class, Communal group, Neighborhood, Faction*.<sup>7</sup>

Oleh Miriam Budiardjo, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, melalui

---

<sup>6</sup>Scruton, Roger. “*Kamus Politik*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm-699

<sup>7</sup>Gaffar, Afan. “Menampung Partisipasi Politik”. JSP, Volum 1 No , Juli 1997. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

jalan memilih pimpinan negara baik secara langsung atau tidak langsung, selain itu juga ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*Public Policy*). Kegiatan partisipasi semacam ini antara lain memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, terlibat menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial.<sup>8</sup>

Beberapa tokoh seperti Herbert McClosky dan Samuel P.Huntington juga memiliki pandangan yang hampir sama soal partisipasi politik.<sup>9</sup> Oleh Herbert McClosky, partisipasi politik dianggap sebagai suatu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan menurut Samuel P.Huntington, partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Lebih lanjut tindakan partisipasi bisa dilakukan secara individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif dan bahkan bisa secara damai atau dengan kekerasan.

Dalam konteks elektoral, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Hal ini dilakukan berdasarkan kesadaran terhadap tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.<sup>10</sup> Tentu saja kesadaran dan partisipasi politik suatu masyarakat berbeda satu sama lain. Ini mencakup dalam konsep partisipasi politik seperti sikap apatisisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik.

Melihat akar sejarah partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, dan kesadaran politik cenderung hadir dari mereka yang berpendidikan, yang hidupnya lebih baik

---

<sup>8</sup>Budiardjo, Miriam. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" edisi revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm-367

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 367-368

<sup>10</sup>Maran, Rafael Raga. "*Pengantar Sosiologi Politik*".(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm-147

dan mapan secara ekonomi, serta orang-orang yang terkemuka (kelas sosial tertentu). Bahkan sejarah di Eropa mencatat bahwa partisipasi politik hanya diikuti oleh kalangan elit saja alam perwakilan. Sedangkan di Amerika Serikat, keterlibatan perempuan dalam politik dengan diberikannya hak suara dalam pemilihan setelah terjadi Amandemen ke-19 pada tahun 1920. Pengalaman sejarah perkembangan hak politik masyarakat menunjukkan sinyal positif, dimana hampir disemua negara demokrasi partisipasi dalam politik menjadi nyata adanya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, terutama dalam pemilihan maka menunjukkan rezim yang terpilih dan berkuasa mendapatkan keabsahan (*legitimasi*) yang tinggi.<sup>11</sup>

Perlu untuk diketahui bahwa, partisipasi dalam masyarakat demokrasi dan masyarakat non-demokrasi misalnya tentu berbeda. Perbedaan itu juga di katagorikan berdasarkan lapisan masyarakat seperti masyarakat primitif, masyarakat sedang berkembang, dan masyarakat modern. Oleh Frank Lindenfeld, faktor utama seseorang ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah dikarenakan terdapat kepuasan finansial. Status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang teralienasi dari kehidupan politik, dan orang semacam ini cenderung apatis terhadap politik. Sebaliknya tidak terjadi bagi orang yang mapan secara finansial (ekonomi).<sup>12</sup> Bahkan sebagian dari partisipasi politik dipengaruhi oleh adanya sumber daya, misalnya warga negara hanya akan ikut berpartisipasi jika mereka mempunyai waktu, uang, keahlian kognitif, dan sumberdaya yang lain. Warga negara yang semacam ini cenderung mudah dan menjadi bidikan mobilisasi politik.

---

<sup>11</sup>*Opcit*, Budiardjo Miriam, hlm-369

<sup>12</sup>*Opcit*, Maran, Rafael Raga, hlm-156. Rujukan referensi bacaan lain mengenai partisipasi politik, penjelasan yang diungkapkan oleh Marc Hooghe dengan judul artikelnya “Budaya Politik” dalam T. Ishiyama, John & Markije Breuning, “ILMU POLITIK dalam Paradigma Abad ke-21”, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), hlm 341-343. Selain itu baca juga karangan Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (2001) tentang “Perbandingan Sistem Politik”, pada salah satu chapter memuat tulisan yang membahas mengenai kebudayaan dan partisipasi politik.

Sehubungan dengan partisipasi politik, Milbrath setidaknya menempatkan empat faktor utama seseorang terlibat dalam partisipasi politik<sup>13</sup>, yaitu;

- 1) *Faktor adanya perangsang*, dalam hal ini minat ikut berpartisipasi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal lainnya.
- 2) *Faktor karakteristik pribadi seseorang*, ia yang memiliki kepekaan sosial, punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya cenderung lazim mudah terlibat dalam aktivitas politik.
- 3) *Faktor karakter sosial seseorang*, ini menyangkut dengan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Lingkungan sosial dianggap memiliki andil dalam mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam pandangan politiknya. Mereka yang berasal dari lingkungan sosial yang rasional dianggap memiliki penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya mau memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Atas alasan inilah mereka mau terlibat aktif dalam kehidupan politik.
- 4) *Faktor situasi atau lingkungan politik*, lingkungan politik yang kondusif dianggap membuat orang dengan senang hati ambil peran dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Misalnya dalam lingkungan politik yang demokratis, orang akan merasa lebih bebas dan nyaman dalam memberikan pandangan dan pilihan politiknya ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter yang dianggap penuh dengan aktifitas brutal dan kekerasan didalamnya. Secara tidak langsung, aktifitas politik semacam itu akan menjauhkan masyarakat dari wilayah dan aktifitas politik.

Selain faktor diatas, terdapat pula beberapa faktor lain yang mampu mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Faktor legal-formal misalnya, seperti pemilihan sistem

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 156-157

pemilihan, watak dari partai politik, serta ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik. Selain itu, faktor pembagian kelas dalam pranata sosial masyarakat juga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat, terlebih hadirnya suatu partai politik berlatar kelas sosial tertentu.

## **2. Voting dalam Pemilu**

Partisipasi dalam pemungutan suara (*voting*) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Dalam negara demokrasi, *voting* juga bisa diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden (eksekutif) atau pemilihan anggota dewan (legislatif). Michael Rush dan Philip Althoff menyebutkan, bentuk partisipasi semacam ini merupakan partisipasi yang tidak membutuhkan banyak upaya, karena memberikan hak suara dalam pemilu hanya dilakukan pada saat tertentu saja (saat diperlukan).<sup>14</sup>

Secara mendasar partisipasi masyarakat dalam politik melalui memberikan suara pada pemilihan umum dianggap sebagai bukti masyarakat yakin dengan mekanisme ini mempunyai efek politik (*political efficacy*). Di berbagai negara demokrasi, partisipasi dianggap sebagai bentuk kedaulatan rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum, rakyat meyakini orang-orang yang mereka pilih akan mewakili dan memperjuangkan aspirasinya. Bahkan di Amerika Serikat diakui bahwa hak memilih secara bebas kandidat pilihan seseorang merupakan inti dari sebuah masyarakat yang demokratis.

Berkenaan dengan ini, seorang hakim yang menangani sengketa Pemilu presiden Bush v. Gore dari Pengadilan Palm Beach Circuit mengatakan “*hak pilih adalah sama berharganya dengan hidup itu sendiri bagi mereka yang telah menjadi korban dari*

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm-157

*kekejaman perang, bagi mereka yang kerabat dekatnya dilarang menggunakan hak pilihnya hanya karena alasan ras atau gender mereka, dan mereka yang telah mempertaruhkan”*.<sup>15</sup>

Memberikan hak suara dalam pemilu juga merupakan kontrol atas sirkulasi elit politik dalam pusaran kekuasaan. Logika sederhana ialah, warga negara memiliki kekuatan untuk menekan pembuat keputusan (elit) untuk memberikan perhatian atas tuntutan yang mereka suarakan. Jika tuntutan tidak mendapat perhatian maka dalam proses elektoral selanjutnya para elit tidak akan terpilih kembali, begitulah konsekuensi dan kontrol politik warga negara bekerja. Bahkan oleh Joseph Schumpeter<sup>16</sup> memandang “demokrasi berarti bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak orang-orang yang mencalonkan diri untuk memimpin mereka”.

### **3. Suara Tidak Sah dalam Pemilu**

Suara tidak sah dalam pemilu merupakan suatu hal yang rentan terjadi dalam proses pemilihan umum. Bahkan hampir setiap pemilu ditemukan kasus terjadinya surat suara tidak sah. Penyebab surat suara tidak sah dalam pemilu tentu disebabkan berbagai faktor, seperti kesalahan teknis dari penyelenggara pemilu, pencoblosan ganda atau ketidakpahaman secara teknis dalam proses pencoblosan oleh pemilih, dan bahkan bisa saja terjadi karena bagian dari *electoral malpractice*.

Sehubungan dengan *electoral malpractice*, Sarah Birch menyebutkan bahwa secara sederhana praktik ini merupakan keadaan atau tindakan dimana terjadi manipulasi dalam penyelenggara pemilu yang menyebabkan tersingkirnya kepentingan publik oleh kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan partisan yang berakibat pada penyelenggaraan pemilu yang

---

<sup>15</sup>Charles L. Zeldon, *Bush v. Gore: Exposing The Hidden Crisis in American Democracy*, 76 (2010) dalam Chad Vickery, *Pedoman Untuk Memahami, menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. (Amerika Serikat; IFES. 2011)

<sup>16</sup>Pandangan ini lebih lanjut bisa dilihat dalam Andrew Heywood, “Politik”(Edisi Keempat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm-357

melenceng dan hanya menguntungkan kalangan tertentu. Menurutnya, apapun bentuk penyimbangan yang terjadi dalam pemilu dianggap sebagai wujud dari praktik *electoral malpractice*.<sup>17</sup>

Berbeda dengan Birch, ilmuwan lain seperti Vickery dan Shein secara hati-hati mencoba untuk memisahkan antara *malpractice* dan *fraud*, karena terdapat area tengah yang mereka sebut sebagai *criminal malpractice*.<sup>18</sup> Menurut mereka, *electoral malpractice* adalah “*the breach by an election professional of his or her relevant duty of care, resulting from carelessness or neglect*”, sementara *electoral fraud* yaitu “*deliberate wrong-doing by election officials or other electoral stakeholders, which distorts the individual or collective will of the voters*”. Jika *malpractice* pendekatannya pada kecerobohan dan pengabaian, sedangkan *fraud* penekanannya terletak pada faktor tindakan kesengajaan untuk mendistorsi hasil pemilu.

Surat suara tidak sah atau tidak sah juga bisa terjadi akibat dari ekspresi politik memilih atau biasa disebut dengan istilah *Protest Voting*. Menurut Harrop dan Miller, *protest voting* adalah tindakan yang diberikan dalam pemilihan umum, yang ditujukan untuk memprotes hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum tersebut. Sarasan protes dalam konteks ini biasanya ialah para kandidat, tim sukses, sistem pemilu, dan bahkan sistem politik secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengekspresikan pandangan politik yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan cara yang berbeda. Biasanya, dampak dari perilaku *protest voting* adalah tersampainya sikap politik tertentu kepada publik dan pemerintah.<sup>19</sup>

Untuk melihat acuan surat suara sah atau tidak pada pemilu serentak 2019 yaitu melalui aturan formal oleh lembaga *Electoral Management Body* seperti lembaga Komisi

---

<sup>17</sup>Birch, Sarah. *Electoral Malpractice*, Chapter 1. (United Kingdom: Oxford university Press, 2013), hlm-11

<sup>18</sup>Lihat pandangan Vickery dan Shein dalam Ghafar Karim, Abdul, dkk. Laporan Akhir Penelitian “*Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Yogyakarta: PolGov, 2016) hlm 6-7

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm-7

Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan mengenai sah atau tidaknya surat suara pada pemilihan telah diatur dan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 berkenaan tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Setidaknya terdapat beberapa peraturan yang perlu dilihat untuk menentukan suara sah atau tidak pada pemilihan umum, diantaranya:

1. Surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Berkenaan dengan ini telah dicetuskan pada Pasal 35 Ayat 2 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2019, dimana disebutkan bahwa surat suara yang diterima pemilih harus telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selanjutnya pada Pasal 38 Ayat 1 huruf a mengatur bahwa ketua KPPS perlu menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih. Oleh karena itu, poin ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena secara teknis pemilihan pada pemilu tanda tangan ketua KPPS turut menentukan sah atau tidaknya surat suara pada proses penghitungan suara nantinya.
2. Ketentuan untuk surat suara Presiden/Wakil Presiden. Berkenaan dengan ini, surat suara akan dinyatakan sah mencoblos satu kali pada nomor urut/nama salah satu pasangan calon/foto pasangan calon atau tanda tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Secara teknis suara dianggap sah jika; surat suara dicoblos di nama capres dan cawapres salah satu pasangan calon, surat suara dicoblos di nomor urut dan atau partai pengusung salah satu pasangan calon, surat suara dicoblos di garis batas dalam kolom nomor urut maupun gambar salah satu pasangan calon. Sedangkan suara dinyatakan tidak sah jika; surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden, surat suara dicoblos tahi dirusak/dilubangi, surat suara dicoblos tapi dicoret-coret.

3. Ketentuan untuk surat suara DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten atau kota. Secara teknis surat suara akan dinyatakan sah apabila mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota legislatif. Sedangkan suara tidak sah jika; surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom paartai politik/nama calon, surat suara dicoblos tapi dirusak/dilubangi, surat suara dicoblos tapi dicoret-coret.
4. Ketentuan surat suara untuk DPD. Secara teknis surat suara dinyatakan sah jika mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon. Sedangkan suara tidak sah jika; surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom calon, surat suara dicoblos tapi dirusak/dilubangi, surat suara dicoblos tapi dicoret-coret.

Jika hal-hal yang telah ditentukan diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka suara pemilih dinyatakan tidak sah oleh petugas penyelenggara pemilu. Beberapa ketentuan lain yang menyebabkan surat suara tidak sah yaitu:

1. Jika ditemukan tulisan/catatan lain pada surat suara (Pasal 365 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
2. Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan (Pasal 55 ayat (8) PKPU Nomor 3 tahun 2019).
3. Surat suara dicoblos di lebih dari satu koom pasangan calon/partai politik/nama calon (Pasal 54 PKPU Nomer 3 Tahun 2019)
4. Surat suara dicoblos tapi dirusak atau dilubangi

## **B. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis sementara berkenaan dengan penyebab adanya perbedaan partisipasi pemillih (meski tidak signifikan) pada setiap jenis pemilihan pada Pemilu 2019 karena pemillihan umum dilakukan secara serentak, sehingga fokus

pemilih hanya pada beberapa jenis pemilihan tertentu saja. Sedangkan tidak adanya perbedaan yang signifikan disebabkan pemilih langsung diberikan lima jenis surat suara sekaligus. Penyebab perbedaan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018 di provinsi Riau kuat kaitannya karena faktor keadaan (dinamika politik) dan gaung politik yang berbeda. Berkenaan dengan ada atau tidaknya surat suara tidak sah pada Pemilu 2019 bisa terjadi karena faktor kurangnya pemahaman pemilih tentang mekanisme pencoblosan dan juga bisa karena faktor kesengajaan (*protest voting*) dari para pemilih.

### **III. METODE KAJIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mix-method*) dengan titik berat pada metode kualitatif. Sedangkan tipe penelitian nantinya menggunakan tipe *causal comparative research*, yaitu;

- a) Membandingkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD 2019 serta membandingkan juga dengan Pemilihan Kepala Daerah Riau 2018;
- b) Membandingkan jumlah surat suara tidak sah pada Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD;
- c) Menemukan penyebab perbedaan yang signifikan antara partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD 2019;
- d) Menemukan penyebab adanya suara tidak sah pada Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD

#### **B. Pengumpulan Data dan Informan Penelitian**

##### 1) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

- a) Pertama, sumber sekunder terutama dokumen hasil Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 serta dokumen statistik daerah di Riau untuk mendapatkan gambaran karakteristik pemilih berdasarkan kondisi lingkungannya;
- b) Kedua, sejumlah informan yang dipertimbangkan sebagai pihak yang dapat memberi keterangan mengenai penyebab perbedaan tingkat partisipasi pemilih dan suara tidak sah.

## 2) Pengumpulan dan Konfirmasi Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: pertama, menelusuri dokumen yang sudah ada di KPU dan BPS; kedua, melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan penelitian; ketiga, mengkonfirmasi hasil penelitian kepada beberapa pihak yang diundang dalam Fokus Group Discussion (FGD).

## 3) Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian ini berangkat dari data base persentase partisipasi pemilih pada pemilu dan surat suara tidak sah di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Berdasarkan data tersebut kemudian muncul beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi pilihan dalam menentukan informan. Kriteria yang menjadi pijakan yaitu daerah yang memiliki persentase pemilihan yang tinggi dan juga surat suara tidak sah yang rendah diwakili oleh Kota Pekanbaru dan Dumai, sedangkan untuk kriteria surat suara tidak sah yang tinggi pada Pemilu 2019 diwakili oleh Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian, setelah menentukan Kabupaten/Kota barulah menentukan Kecamatan, Kelurahan hingga KPPS yang dituju berdasarkan data base.

## C. Analisis Data

Penyajian data terutama data perbandingan tingkat partisipasi pemilih menggunakan tabel dan grafik dengan memanfaatkan data-data kuantitatif yang sudah ada pada data base KPU provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se-provinsi Riau. Sedangkan untuk mendapatkan penjelasan penyebab perbedaan tingkat partisipasi pemilih dan surat suara tidak sah, data disajikan dari hasil pemaknaan terhadap hasil wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara *purposive*.

## IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

Pesta demokrasi Pemilihan Umum menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada dasarnya, pemilu bukan saja arena bagi para pemilih untuk mengekspresikan haknya dalam memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara<sup>20</sup>, melainkan juga sebagai arena partisipasi publik dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dan pengawasan. Konteks ini menunjukkan bahwa partisipasi publik menjadi hal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Sejarah mencatat untuk pertama kalinya pemilu serentak digelar dengan menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus, yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu hal yang paling ditunggu dan dihitung selain hasil pemilu adalah angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu<sup>21</sup>. Angka partisipasi pemilih setidaknya menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga juga menjelaskan sejauh mana kekuatan legitimasi dari orang yang terpilih. Selain itu, tidak bisa dinafikan bahwa meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu 2019 merupakan buah kerja dari pihak penyelenggara pemilu (KPU) yang begitu berdedikasi dalam bekerja. Apresiasi tinggi patut kita berikan kepada pihak penyelenggara pemilu mulai dari penyusunan, persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara hingga akhir rekapitulasi. Proses panjang dan melelahkan terbayar dengan suatu prestasi yang membanggakan dari pencapaian angka persentase partisipasi pemilih yang tinggi. Meski masih terdapat beberapa persoalan yang perlu evaluasi dan perbaikan kedepannya.

---

<sup>20</sup> George Sorensen. 1993. *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal: 13.

<sup>21</sup> Ramadhani, Fadli, dkk. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan perludem.

Pada pemilu 2019 ini, partisipasi pemilih diklaim melebihi target yang ditetapkan oleh KPU yaitu mencapai 80,90%. Tentu ini menjadi pencapaian tersendiri bagi eksistensi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Untuk wilayah Provinsi Riau sendiri, partisipasi pemilih untuk pilpres mencapai 78,15% bila dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 62%. Sedangkan untuk pemilu legislatif jumlahnya 77,59%, DPD RI 77,88%, DPRD Provinsi 78,03%, dan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 79,99%. Artinya partisipasi pemilih mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya. Tingkat partisipasi tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu dan yang terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. (Tribun Pekanbaru, 24 Mei 2019).

Praktik pemilu serentak ini tentu saja tidak mudah dan penuh tantangan. Tantangan yang jelas terlihat adalah praktik pemilu yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya baik dari segi teknis, situasi sosial politik dan pola kampanye<sup>22</sup>. Di Provinsi Riau, penyelenggaraan pemilu secara umum berjalan dengan lancar. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih menyisakan banyak persoalan. Salah satunya adalah proses pemilu yang memakan waktu panjang dan melelahkan. Buntut panjang dari hal ini adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia saat mengurus pagelaran akbar ini. Di provinsi Riau, terdapat 6 orang dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas yang meninggal akibat kelelahan. Total ada 28 orang penyelenggara yang mengalami kemalangan, 6 orang meninggal dan 22 orang lainnya mengalami sakit. (Republika, 24 April 2019)

Selain itu, terdapat 30 TPS di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada tanggal 27 April 2019. Hal ini dilaksanakan bukan tanpa alasan, sebab ada beberapa temuan di lapangan yang

---

<sup>22</sup>Huda, Khairil, dkk. 2018. *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 Nomor 3 Tahun 2018

berkaitan dengan ketidaksesuaian identitas dengan tempat pencoblosan, tidak seimbangnya surat suara dan jumlah pemilih. Ditambah lagi dengan masalah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berbeda dengan pemilu serentak 2019, pilkada 2018 di Provinsi Riau justru menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Jumlah pengguna hak pilih di Provinsi Riau hanya sekitar 2,14 juta pemilih dari 3,6 juta jumlah daftar pemilih tetap Provinsi Riau. Dari 77,5 persen target yang ditetapkan, partisipasi pemilih hanya sekitar 59,25 persen saja. Beberapa faktor disinyalir menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Ketua KPU Provinsi Riau mengatakan bahwa penyebabnya ialah kurangnya sosialisasi, kondisi hujan yang hampir merata terjadi di Provinsi Riau juga faktor digelarnya piala dunia.

Sebelum dilaksanakannya pilkada 2018, KPU Provinsi Riau telah mengadakan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, salah satunya adalah dengan menggelar roadshow di 11 Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik warga daerahnya. Namun upaya tersebut ternyata belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2018 di Provinsi Riau.

Seperti yang kita ketahui, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2018. Pesta demokrasi di bumi lancang kuning itu dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018. Dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak tersebut, kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif. Hal tersebut sesuai dengan indeks kerawanan pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa Provinsi Riau masuk dalam kategori kerawanan sedang.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Partisipasi Pemilu 2019 di Provinsi Riau**

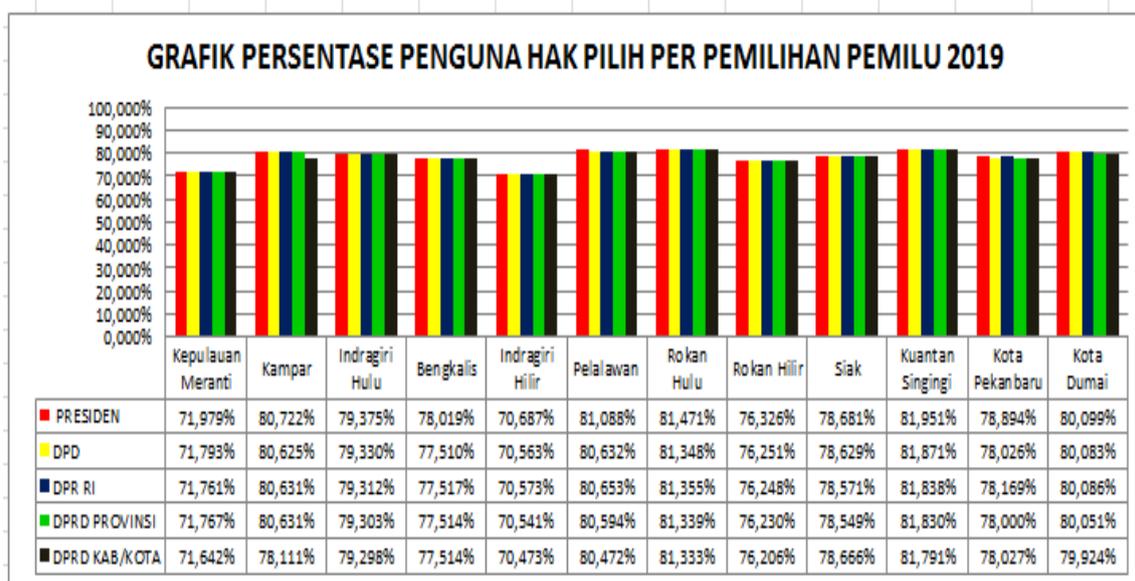
Berdasarkan pemetaan hasil Pemilu tahun 2019 di Riau, maka tingkat partisipasi pemilih meningkat dari standar yang telah ditetapkan oleh KPU (75 persen). Peran penyelenggara pemilu sangat krusial dalam hal peningkatan partisipasi pemilih pada perhelatan pesta demokrasi kali ini. Konsolidasi dalam mengelola dinamika politik elektoral begitu terasa, melalui media massa sebagai mitra kerja penyelenggara pemilu dan penyuluhan oleh KPU begitu intens dilakukan. Hal ini membuahkan hasil dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019 rata-rata menyentuh angka diatas 77 persen di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Riau. Bahkan beberapa diantaranya tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 80 persen lebih, seperti Kabupaten Kampar (80,72%), Pelalawan (81,08%), Rokan Hulu (81,47%), Kuantan Singingi (81,95%), dan Kota Dumai (80,09%).(Lihat Tabel 1.1 dan Grafik 2.1)

Tabel 1.1  
Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten	Persentase Partisipasi Pemilih				
		Pemilihan Presiden	Pemilihan DPD	Pemilihan DPR RI	Pemilihan DPRD Provinsi	Pemilihan DPRD Kab/Kota
1	Kepulauan Meranti	71,979%	71,793%	71,761%	71,767%	71,642%
2	Kampar	80,722%	80,625%	80,631%	80,631%	78,111%
3	Indragiri Hulu	79,375%	79,330%	79,312%	79,303%	79,298%
4	Bengkalis	78,019%	77,510%	77,517%	77,514%	77,514%
5	Indragiri Hilir	70,687%	70,563%	70,573%	70,541%	70,473%
6	Pelalawan	81,088%	80,632%	80,653%	80,594%	80,472%
7	Rokan Hulu	81,471%	81,348%	81,355%	81,339%	81,333%
8	Rokan Hilir	76,326%	76,251%	76,248%	76,230%	76,206%
9	Siak	78,681%	78,629%	78,571%	78,549%	78,666%
10	Kuantan Singingi	81,951%	81,871%	81,838%	81,830%	81,791%
11	Kota Pekanbaru	78,894%	78,026%	78,169%	78,000%	78,027%
12	Kota Dumai	80,099%	80,083%	80,086%	80,051%	79,924%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Grafik 2.1  
Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau



Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Sehubungan dengan ini, tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa difrensiasi tingkat partisipasi pemilih antar level pemilihan pada pemilu tahun 2019 di Riau tentu tidak begitu menonjol. Meski terdapat perbedaan pada partisipasi pemilih namun tidak begitu signifikan, sehingga ini tidak bisa dikategorikan dalam tingkat difrensiasi yang tinggi terhadap partisipasi pemilih antara setiap jenis pemilihan pada Pemilu 2019. Meskipun partisipasi pemilih pada level pemilihan presiden masih unggul dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada level pemilihan DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari minimnya persentase pemilih pada setiap level pemilihan pada pemilu 2019, secara teknis hal ini tentu bisa saja terjadi mengingat terdapat jenis pemilihan yang berbeda seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPTk). Misalnya untuk pemilihan presiden/wakil presiden, partisipasi

sedikit lebih tinggi pada Kabupaten/Kota tertentu bisa karena terjadi penambahan pemilih dari DPT yang telah ditentukan. Mengingat untuk level pemilihan presiden berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang berada diseluruh wilayah administrasi negara pada Pemilihan Umum.

Penyebab tingkat partisipasi pemilih pada level pemilihan presiden sedikit lebih tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain euforia politik elektoral tahun 2019 memang cenderung didominasi oleh intensitas persaingan *issue* politik nasional terutama persaingan antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembelahan sosial di akar rumput menjadi salah satu bukti bahwa intensitas politik pada level Pilpres begitu tinggi. Selain itu juga, sosialisasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden juga intens dilakukan oleh berbagai pihak. Bahkan proses debat politik antara calon presiden dan wakil presiden selalu disiarkan secara langsung di Televisi (TV) nasional maupun swasta. Sehingga wajar saja persentase tingkat partisipasi pemilih untuk level Pilpres sedikit lebih unggul dibandingkan dengan level pemilihan calon Anggota Legislatif.

Senada dengan hal ini, fakta di lapangan juga menunjukkan hal serupa dimana berdasarkan pengakuan masyarakat berkenaan dengan hasrat untuk berpartisipasi pada jenis pemilihan presiden sungguh sangat tinggi, berbeda dengan semangat memilih pada jenis pemilihan Legislatif. Berikut kutipan wawancara langsung dengan warga yang berasal dari Kota Pekanbaru;

*“Partisipasi pemilih tinggi, antusias masyarakat sangat tinggi, semangat, bahkan pagi sudah banyak yang mengantri. Tapi ya itu yang banyak, mereka kayaknya larinya itu memilih presiden aja, yang lain enggang memilih, alasannya mungkin ya karna rame calon, ada yang lama, ada yang baru, apa yang dijanjikan sama yang lama setelah duduk tidak ditepati dan masyarakat*

*tidak memilih lagi, dan juga ada yang tidak dikenal”.* (H. Asril Sidi Basa, KPPS Kel. Simpang Baru)

*“Antusias tinggi karna ada Pilpresnya, karena daya tarik paling besar itu di Pilpres, sehingga ada yang mau mencoblos tapi karena tidak ada surat suara presiden mereka tidak jadi mencoblos, mereka pulang, memang disitu kami lihat, di pilpresnya yang dominan”.* (Perdiman, KPPS Kel. Sialang Munggu)

*“Memang antusias kemarin karna opini yang terbentuk di masyarakat, ini kita memilih pemimpin negara, ada dua kubu yang berkompetisi dengan tipikal masing-masing dan punya massa. Kalau tidak milih, jagoan saya tidak menang, dengan frame mereka sendiri yang membuat antusias”*(Arhipen Yapatra, KPPS Kel. Sialang Munggu)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat Dumai, partisipasi masyarakat tinggi pada pemilu 2019 disebabkan oleh dorongan untuk memilih presiden dan juga sebagian lain ingin memilih anggota dewan pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenis pemilihan yang lain seperti DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi tidak menjadi prioritas bagi masyarakat untuk memilih. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan para narasumber:

*Yang mereka perhatikan hanya pemilihan presiden dan DPRD kota, yang lain ya pilih bebas aja gitu kan acak-acak aja mana yang nampak. Sebenarnya masyarakat ini hanya pengen ketemu meski sifatnya hanya sekali. Fokus mereka hanya di kota dan presiden* (Dewi, KPPS Kel. Bangsal Aceh)

*Pemilu 2019 partisipasi presiden dan DPRD kota agak lumayan ini, masyarakat kebanyakan cuma presiden aja, yang caleg ngak mau tau. Disamping presiden,*

*memang pemilihan DPRD kota menyusul. Bahkan ada yang berkata “saya tidak memilih yang lain selain presiden, kalo ngak ada surat suara saya tidak mau milih” (Gunardi, KPPS Kel. Tanjung Penyembal)*

*Kalau memilih presiden, saya rasa pasti tinggi karena ini memilih pemimpin bangsa, jadi orang semangat untuk memilih, kalau untuk DPR ini payah masyarakat, malas masyarakat memilih (Ambok Angka, KPPS Kel. Bangsal Aceh)*

Penyebab tingginya partisipasi masyarakat pada jenis pemilihan presiden terkonfirmasi bahwa masyarakat merasa penting untuk memilih kepala negara yang kelak memimpin bangsa. Hal ini dianggap oleh masyarakat bahwa presiden yang terpilih nanti mampu memberi dampak pada kehidupan mereka kelak melalui berbagai kebijakan yang dilakukan. Berbeda dengan jenis pemilihan legislatif, masyarakat enggan memilih karena merasa tidak membawa dampak dalam kehidupan mereka. Alasan lain yaitu masyarakat merasa kebingungan untuk memilih karena terlalu banyak daftar calon dan kampanye yang dilakukan juga minim sehingga masyarakat tidak kenal dengan calon yang akan dipilih. Berikut ulasan masyarakat mengenai hasrat memilih calon anggota Legislatif pada Pemilu 2019:

*Untuk pemilihan anggota DPR aku rasa sama saja masyarakat kurang semangat. DPRD kota mungkin sedikit lebih ada partisipasi, beda dengan pemilihan DPR RI, DPD, DPR Provinsi, seolah-olah perhatian mereka itu tak ada kepada kita, beda dengan DPRD Kota terasa lebih dekat, kalau ada sesuatu mereka bisa untuk dijumpai dan mendengar aspirasi warga (Ambok Angka, KPPS Kel. Bangsal Aceh)*

*DPR terlalu banyak suara yang dicuekkan oleh masyarakat karena tidak ada dari mereka yang turun kampanye atau sosialisasi langsung kepada kami, dan*

*masyarakat merasa “diapun tidak memperkenalkan diri dan masyarakat tidak mencintainya, ya kan!, makanya tidak dipandang sama sekali”. Yang mereka perhatikan hanya pemilihan presiden dan DPRD kota, yang lain ya pilih bebas aja gitu kan acak-acak aja mana yang nampak (Dewi, KPPS Kel. Bangsal Aceh)*

*Rata-rata, tim dari DPRD kota pada saat kampanye mengarahkan untuk memilih calon presiden, mungkin berhubungan dengan koalisi partai, meski untuk DPRD provinsi, DPR RI dan DPD juga ada, tapi hanya sebatas saja (Agus Nedi, PPK Kec. Sungai Sembilan)*

Berdasarkan data persentase partisipasi pemilih dan wawancara langsung dengan masyarakat untuk Pemilu 2019 memang antusias masyarakat untuk memilih tinggi. Selisih angka partisipasi antar jenis pemilihan juga tidak begitu signifikan, meski hal tersebut memiliki jawaban setelah ditelusuri lebih dalam. Dimana meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lebih karena faktor dorongan masyarakat untuk memilih calon presiden, sehingga jenis pemilihan yang lain juga ikut terangkat angka partisipasinya. Masyarakat cenderung hanya antusias pada jenis pemilihan presiden karena mereka menganggap penting untuk memilih pemimpin bangsa yang akan membawa dampak pada kehidupan mereka kelak. Sedangkan pada jenis pemilihan Legislatif, masyarakat hanya lebih cenderung memilih calon DPRD Kabupaten/Kota karena dianggap lebih dekat dengan rakyat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mampu menyerap aspirasi secara langsung. Selain itu, pandangan masyarakat untuk pemilihan Legislatif tidak begitu penting karena tidak berdampak pada kehidupan mereka. Bahkan menurut masyarakat, kebanyakan dari Anggota Dewan setelah terpilih abai dan lupa terhadap apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampanye sebelum pemilihan. Itulah beberapa temuan yang mendasari terjadinya perbedaan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau.

## **2. Perbandingan Partisipasi Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018 di Provinsi Riau**

Jika dibandingkan dengan Pilkada Riau 2018, maka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 jauh lebih tinggi. Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 hanya sebesar 58 persen, sedangkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menyengetuh angka 78 persen pada pemilu 2019 dan angka tersebut melebihi angka yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi yaitu 75 persen. Perbedaan partisipasi ini bisa dilihat dengan jelas dalam bentuk data kuantitatif, dimana setiap Kabupaten/Kota terjadi ketimpangan angka partisipasi pada Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 di Provinsi Riau. (lihat Tabel 1.2 dan Grafik 2.2)

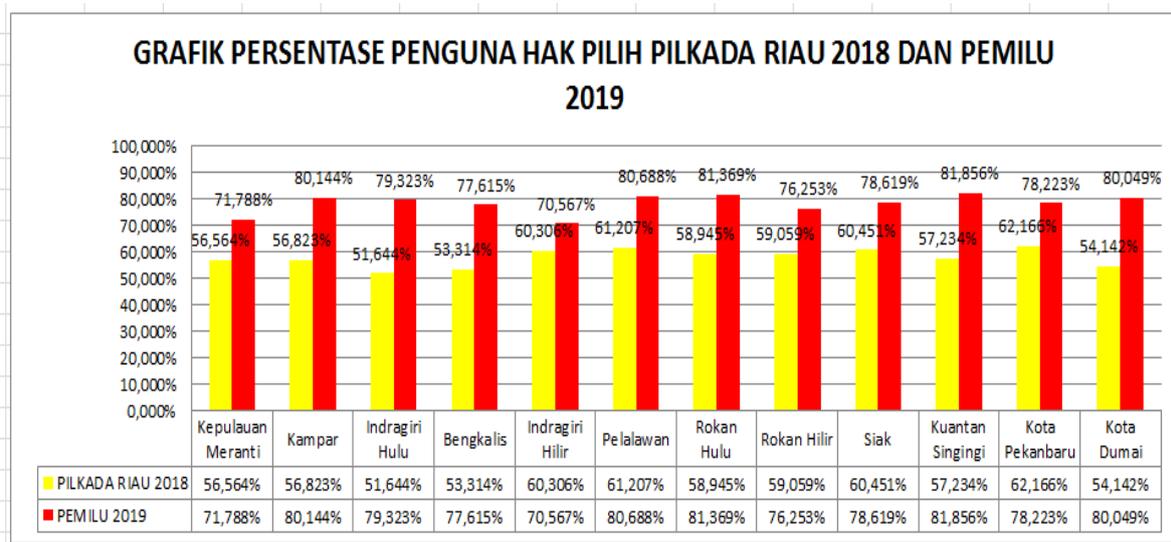
Tabel 1.2  
Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten	DPT		Persentase Partisipasi Pemilih	
		Pemilu 2019	Pilkada Riau 2018	Pemilu 2019	Pilkada Riau 2018
1	Kepulauan Meranti	147.517	135.461	71,788%	56,564%
2	Kampar	510.475	449.804	80,144%	56,823%
3	Indragiri Hulu	301.342	270.512	79,323%	51,644%
4	Bengkalis	412.262	363.873	77,615%	53,314%
5	Indragiri Hilir	491.150	448.503	70,567%	60,306%
6	Pelalawan	226.417	193.622	80,688%	61,207%
7	Rokan Hulu	339.328	310.627	81,369%	58,945%
8	Rokan Hilir	417.327	372.645	76,253%	59,059%
9	Siak	297.161	267.380	78,619%	60,451%
10	Kuantan Singingi	232.018	214.156	81,856%	57,234%
11	Kota Pekanbaru	611.093	497.880	78,223%	62,166%
12	Kota Dumai	199.963	174.249	80,094%	54,142%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Grafik 2.2

Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Provinsi Riau



Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Selisih angka 20 persen antar partisipasi pemilih pada Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu serentak 2019 merupakan jarak yang signifikan. Perbedaan tingkat partisipasi tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor. Sebut saja misalnya gaung politik pada pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan gaung politik pada Pilkada 2018 yang hanya berskala provinsi. Hasrat masyarakat untuk memenangkan calon pilihan juga menjadi bukti bahwa sosok pemimpin yang diharapkan harus dikenal dengan baik oleh masyarakat. Berkenaan dengan ini, bisa saja Pemilu 2019 menjadi tinggi tingkat partisipasinya karena dorongan masyarakat untuk memilih Presiden. Selain itu juga, jangkauan para kandidat atau tim pemenangan calon anggota dewan tingkat DPRD Kabupaten/Kota yang turut berkampanye juga menjadi pertimbangan masyarakat. Disisi yang lain, peran media juga sangat berpengaruh terhadap hasrat dan perilaku pemilih untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019, dan hal tersebut tidak terjadi pada Pilkada 2018.

Selain dua faktor yang telah disebutkan, secara substansial rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 di Provinsi Riau karena masyarakat “terlanjur” kecewa terhadap elit-elit politik di daerah. Terutama berkenaan dengan isu-isu pembangunan dan kebijakan yang pro terhadap masyarakat banyak itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat berikut:

*Masyarakat merasa, selama ini pun ada gubernur macam tidak ada perubahan, meskipun ada perubahan, seperti jalan ini memang program Provinsi, tapi istilahnya tidak bersentuh langsung jadi seolah-olah tidak nampak. Gubernur cuma di kota, sosialisasi sampai ke lapangan susah, mungkin dari warung ke warung secara personal. (Gunardi, KPPS Kel. Tanjung Penyembal)*

*Untuk Pilgub, ya sama ku rasa tidak begitu antusias, alasannya sama lah kayak di Pileg. Tidak ada perubahan meski telah memilih pileg atau gubernur beberapa kali. “Siapapun yang dipilih kita gini-gini aja” begitulah ucapan masyarakat. (Ambok Angka, KPPS Kel. Bangsal Aceh)*

Pendapat masyarakat tentang semangat memilih yang rendah pada Pilkada 2018 cenderung berkenaan dengan kurangnya popularitas para kandidat dan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Terlebih pada kontestan dan tim pemenangan tidak terjun langsung “menyapa” masyarakat di akar rumput. Bagi mereka, dikunjungi oleh elit politik dan calon yang maju dalam kontestasi sudah sangat senang karena merasa dihargai keberadaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Dewi (KPPS, Kel. Bangsal Aceh), masyarakat awam ini, “*ibarat kalo tidak kita jolok maka buahnya tidak akan jatuh*”. Budaya masyarakat melayu, “*berkunjung merupakan bentuk penghargaan*” dan itu yang tidak ada pada saat Pilkada 2018.

## 2.1. Peran Penyelenggara Pemilu

Harus diakui bahwa kinerja penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 merupakan salah satu hal yang krusial. Keberhasilan tersebut bukan tanpa tantangan, dimana dalam mengontrol isu-isu dan opini yang berkembang di publik begitu kencang dalam dinamika sosial-politik. Terlebih aktifitas masyarakat di media sosial yang tidak terkendali dalam menggiring isu-isu politik yang begitu berdinamika. Disinilah penyelenggara hadir baik dari tingkat pusat hingga daerah melalui PPK, PPS dan KPPS dalam menyapa masyarakat pemilih untuk senantiasa menjaga semangat dalam menggunakan hak suaranya. Pengakuan terhadap kinerja ini kemudian terkonfirmasi selama kami melakukan penelitian dilapangan, seperti yang diungkapkan oleh ibu dewi dan pak Agus di Dumai serta pak Amin di Indagiri Hulu. Berikut ini kutipan wawancara dengan para informan:

*Kami sebagai petugas di lapangan selalu mengajak warga untuk ikut aktif dalam pemilu, pengalaman juga waktu di Pilkada 2018 lalu, saya selalu mengajak ibu-ibu untuk ikut memilih, karena memilih merupakan hak kita sebagai warga negara, jadi kita wajib memilih dan terlibat dalam politik. (Dewi, KPPS Kel.Bangsar Aceh)*

*Kami sebagai PPK selalu mendorong masyarakat untuk aktif dalam menggunakan hak suaranya, kami dari PPK mencoba memberikan sosialisasi mulai dari sekolah-sekolah untuk pemilih pemula, melalui forum perwiraan di desa-desa, namun kami hanya terbatas pada mengajak dan mensosialisai untuk menggunakan hak suara, tidak lebih dari itu. (Agus Nedi, Anggota PPK Bangsal Aceh)*

*Saya sudah beberapa kali terlibat dalam pemilu, baik di Pilkada dan bahkan sekarang di Pilkades, kami dari penyelenggara di lapangan ini sangat bersemangat dalam mengajak penduduk untuk selalu ikut dalam pemilu. Seperti di tempat kita ini, saya merasakan betul bagaimana antusiasme masyarakat ketika kita mengadakan sosialisasi ke sekolah atau forum-forum lain. Tugas kita untuk mensosialisasikan selalu kita lakukan dan tidak ada bosan-bosannya mengajak warga untuk menggunakan hak pilih mereka. (Muhammad Amin, Anggota PPK Batang Gangsal)*

Berdasarkan pengakuan dari penyelenggara pemilu di lapangan, adalah benar bahwa kerja-kerja sosialisasi sangat intens dilakukan. Berbagai cara dilakukan untuk menyapa dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa terlibat aktif dalam memberikan hak politiknya dengan hadir di bilik suara untuk mencoblos. Sosialisasi pada sekolah-sekolah bertujuan untuk menysasar para pemilih pemula, dimana pemilih pemula harus mendapat informasi yang benar karena ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka dalam memberikan hak suara dalam politik elektoral. Sedangkan apa yang dilakukan pada forum wirid ibu-ibu di pedesaan bertujuan untuk mengajak ibu-ibu untuk terlibat aktif karena peran ibu-ibu juga besar dalam partisipasi.

## **2.2. Gaung Politik**

Dinamika politik di akar rumput pada pesta demokrasi elektoral 2019 sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Isu-isu tersebut kemudian dijadikan oleh masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jagoan (pilihan) dalam Pemilu serentak 2019, terutama untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan terdapat juga pembelahan di masyarakat akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik yang tajam pada level pemilihan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Hotman,

salah seorang dari KPPS di Kel. Batang Gangsal, *“Kalau pembelahan karna beda pilihan itu biasa, tapi sampai konflik ngak ada, cuma ya itu tadi habis pencoblosan langsung selesai perdebatan soal presiden itu.”*

Faktor lain terjadi perbedaan tingkat partisipasi antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018 di provinsi Riau yaitu berhubungan dengan isu-isu pembangunan dan kebijakan publik. Masyarakat menilai bahwa pada pemilu 2019 terutama untuk pemilihan presiden, isu kebijakan masing-masing pasangan calon mengemuka dan langsung menarik perhatian pemilih atau pendukung masing-masing calon dan hal demikian tidak terjadi pada Pilkada Riau 2018. Terutama berkenaan dengan calon yang maju dalam Pilkada tidak begitu populer dikalangan masyarakat, berbeda dengan calon presiden yang populer dikalangan masyarakat.

Berkenaan dengan penjelasan diatas, berikut ini merupakan hasil wawancara di lapangan dengan para informan:

*Kalo di Pilkada 2018, partisipasi rendah, mungkin masyarakat tidak antusias karna tidak kenal sama calon dan mereka juga tidak turun kesini. Dan juga masyarakat merasa tidak ada perubahan apa-apa bagi hidup mereka setelah milih di Pilkada, tidak berdampak langsung, “ya setelah kita milih hidup kita juga gini-gini aja”, dan juga gimana ya, intensif untuk desa juga kurang dari Pemerintah Daerah(H. Asril Sidi Basa, KPPS Kel. Simpang Baru)*

*Pilgub kemarin suara tidak sah juga kurang, partisipasi pemilih aja waktu itu kurang. Agak kurang cara sosialisasi oleh calon waktu itu, kampanyenya kurang jadi tidak mendorong untuk memilih. Masyarakat tidak kenal dan hanya berbentuk gambar di sosialisasi oleh tim kampanyenya (Jamil, PPK Sungai Sembilan)*

Berdasarkan pengakuan masyarakat terkait partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada 2018 di Provinsi Riau cenderung disebabkan karena masyarakat tidak terlalu kenal dengan para pasangan calon gubernur yang maju dalam kontestasi politik elektoral tersebut. Terkait dengan itu juga, masyarakat enggan memilih karena memang mereka merasa pemilihan pada level ini juga tidak terlalu membawa dampak pada kehidupan masyarakat sehingga sikap apatis muncul manakala harapan yang digantungkan masyarakat kepada pemimpinnya di daerah tidak terakomodasi dan terkesan diabaikan oleh para elit pemimpin daerah. Pengakuan semacam itu bisa kita temukan di akar rumput, seperti yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat, sebagai berikut ini:

*Secara keseluruhan hanya 70 persen di tempat kita pada pilgub 2018. Di masyarakat kita kan masih ada pikiran pragmatis, “siapa pun yang menang, awak masih gini aja nyo”, masih banyak berpikir begitu. Kalo pilpres semua orang punya jagoan masing-masing (Arhipen Yapatra, KPPS Kel. Sialang Munggu)*

*50 persen lebih palingan partisipasi saat Pilgub 2018. Masyarakat ngak terlalu antusias, mau siapapun gubemurnya kita ya gini-gini aja ngak ngaruh. Cuma kalau pilpres orang sepertinya mulai ada pertimbangan politik, kalau presidennya ini nanti akan begini, kalau presidennya itu nanti bakal seperti itu. Jadi orang benar-benar ingin ya entah merubah, atau yang lainnya (Perdiman, KPPS Kel. Sialang Munggu)*

*Pada pilkada, partisipasi kurang semangat dan tidak sama seperti 2019. Kampanye juga kurang, hanya dua paslon yang masuk, karna kampanye sering hanya sampai di kota saja. Kurang greget karna masyarakat kurang mengenal, dan upaya calon juga kurang memperkenalkan diri kepad msyarakat. Ibarat*

*kalo gk datang ketua, wakil saja yang datang masyarakat sudah senang, karena mereka merasa dikunjungi untuk disampaikan aspirasi (Agus Nedi, PPK Sungai Sembilan)*

Berdasarkan pengakuan masyarakat tentang perbedaan antara partisipasi pada Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu serentak 2019, maka jelas bahwa perbedaan gaung politik menjadi salah satu alasan mengapa terjadi difrensiasi pada tingkat partisipasi pemilih. Soal isu-isu politik dan opini publik yang berkembang menjadi pembeda pada kedua momen elektoral tersebut. Masyarakat merasa dinamika politik pada level Pilkada untuk pemilihan Gubernur tidak semenarik pada pemilihan Presiden pada Pemilu serentak. Sehingga dorongan untuk terlibat aktif dalam memberikan hak suara pada Pilkada kala itu jauh dari target partisipasi yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau. Berbeda dengan Pemilu 2019 ini, hasrat memilih masyarakat sangat tinggi karena memang dinamika politik yang terjadi sangat intens baik pada level nasional hingga ke daerah-daerah. Terkait masyarakat ingin adanya perubahan atau menginginkan pemimpin yang sekarang terus melanjutkan program-program kerjanya menjadi alasan kuat bahwa dinamika politik pada Pemilu serentak tahun 2019 begitu bergairah.

### **2.3. Peran Media Massa**

Selain faktor gaung politik, tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 merupakan dampak dari peran aktif media massa, baik media elektronik, media cetak dan tentunya media online. Kemudahan masyarakat mengakses segala jenis media sosial pada saat ini mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi tentang politik. Perkembangan dinamika politik yang begitu dinamis juga bisa disimak secara langsung oleh masyarakat diseluruh pelosok negeri berkat kecepatan akses terhadap informasi. Terlebih berkaitan dengan dinamika politik nasional yang secara rutin menjadi

konsumsi publik dari berbagai tontonan acara di Televisi, terutama berkaitan dengan perkembangan isu-isu politik dan kebijakan publik.

Pada Pemilu 2019, media berperan sangat penting dalam hal proses kampanye politik para calon yang berkontestasi. Berbagai jenis media sosial menjadi incaran bagi tim kampanye pemenangan digunakan sebagai arena sosialisasi sosok kandidat yang diusung. Untuk para pemilih milenial misalnya, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube menjadi referensi untuk menjaring gagasan atau ide-ide politik yang ditawarkan oleh para kandidat. Akumulasi dari berbagai informasi yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik para pemilih.

Berikut ini merupakan beberapa ulasan hasil wawancara dengan masyarakat berkenaan dengan peran media massa dalam dinamika Pemilu 2019 dan Pilkada Riau 2018 silam:

*Kalo di pilpres itu memang apa, karna di media itu mungkin ya.. masyarakat mudah mengakses informasi melalui media, apalagi TV, orang selalu nonton. Kalau untuk Pilgub, sudah di media tidak ada, timses juga tidak ada yang turun kesini. Kalau media Pekanbaru, Riau TV aja nya itu yang ada, itupun disini ngak ketangkap, ngak dapat sinyalnya. (Hotman, KPPS Kel Batang Gangsal)*

*Faktor kerjaan yang membuat masyarakat tidak berpartisipasi dalam pilkada 2018 juga tinggi. Sosialisasi mereka juga kurang, sehingga merasa tidak layak juga untuk diperjuangkan. Yang heran, antusias pada pilpres 2019 sangat tinggi, padahal mereka juga tidak disentuh langsung ya kan, faktor lingkungan dan politik serta berita dan isu di TV mungkin membuat orang ikut memilih (Ali, KPPS Kel.Lubuk Gaung)*

Melihat fakta dilapangan dan disandingkan dengan data persentase pemilih oleh KPU, maka terjawab faktor ketimpangan persentase pemilih pada Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 di Provinsi Riau. Faktor adanya “perangsang” menjadi pembeda untuk tingkat partisipasi pemilih pada dua momen elektoral tersebut. Pengaruh media massa dan diskusi politik yang intens mempengaruhi eskalasi politik pada ranah akar rumput. Masyarakat merasakan betul bagaimana *euforia* pesta demokrasi elektoral berjalan melalui rangsangan opini-opini politik yang muncul pada Pemilu 2019 terutama kontestasi pemilihan Presiden. Hal semacam ini tidak terjadi pada level Pilkada tahun 2018 silam, bisa jadi memang level pemilihan tingkat daerah tidak begitu *booming* mengingat media massa tidak terlalu intens dalam hal *framing* isu-isu politik. Meskipun hanya lewat media Televisi lokal yang menyiarkan debat kandidat langsung dan berita-berita pada koran lokal saja yang menjadi sarana masyarakat untuk menggali informasi.

Jika pada level pemilihan presiden 2019 terjadi pembelahan di masyarakat berkenaan dengan beda pilihan dan pandangan politik, hal demikian tidak terjadi pada Pilkada 2018 silam. Disini menunjukkan bahwa intensitas isu politik dan opini publik berada pada level yang berbeda antara Pilkada 2018 dengan pemilihan presiden pada Pemilu 2019. Sehingga gaung politik yang begitu tinggi serta didukung oleh peran media yang begitu aktif menjadi pembeda antara dua momen elektoral tersebut. Selain dua alasan tersebut, perlu menjadi catatan bahwa peran aktif lembaga penyelenggara pemilu dalam mengelola semangat sosialisai terhadap pemilih juga menjadi faktor lain penyebab partisipasi meningkat dalam pemilu 2019. Sedangkan pada Pilkada 2019, semangat penyelenggara pemilu dalam memberi penyuluhan pada para pemilih tidak diikuti dengan semangat yang sama oleh para kandidat.

### **3. Suara tidak sah atau Tidak Sah pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau**

Selain partisipasi politik yang menjadi tajuk utama pada setiap perhelatan Pemilihan Umum, surat suara tidak sah sesungguhnya juga perlu untuk mendapat perhatian khusus. Jika tingkat partisipasi menjadialah satu tolak ukur sukses atau tidak suatu pemilihan, maka surat suara tidak sah menjadi *asesmen* kualitas Pemilu itu sendiri, terutama soal kualitas pemilih dalam memberikan hak suara dalam demokrasi elektoral. Surat suara tidak sah tentu saja bisa dibaca dengan berbagai perspektif, tergantung pola-pola yang terjadi berdasarkan temuan pada saat hasil pemilihan. Pola tertentu bisa menunjukkan kualitas pemahaman seorang pemilih, dan disisi lain bisa menunjukkan bentuk ekspresi dari para pemilih (perilaku memilih).

Surat suara tidak sah dalam perhelatan Pemilu tentu bukan suatu hal yang baru, bahkan hampir setiap perhelatan elektoral selalu ditemukan kasus surat suara yang rusak atau tidak sah. Pertanyaan kemudian yang menjadi penting yaitu bagaimana cara kita membaca fenomena surat tidak sah atau rusak dari hasil sebuah Pemilu. Selain pola-pola yang terbentuk menjadi acuan untuk dijadikan analisis, perlu kiranya tingkat persentase surat suara tidak sah juga menjadi penting untuk dilihat. Tentu saja angka surat suara tidak sah tidak setinggi persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu, namun kisaran angka 10-30 persen merupakan bukan angka yang kecil.

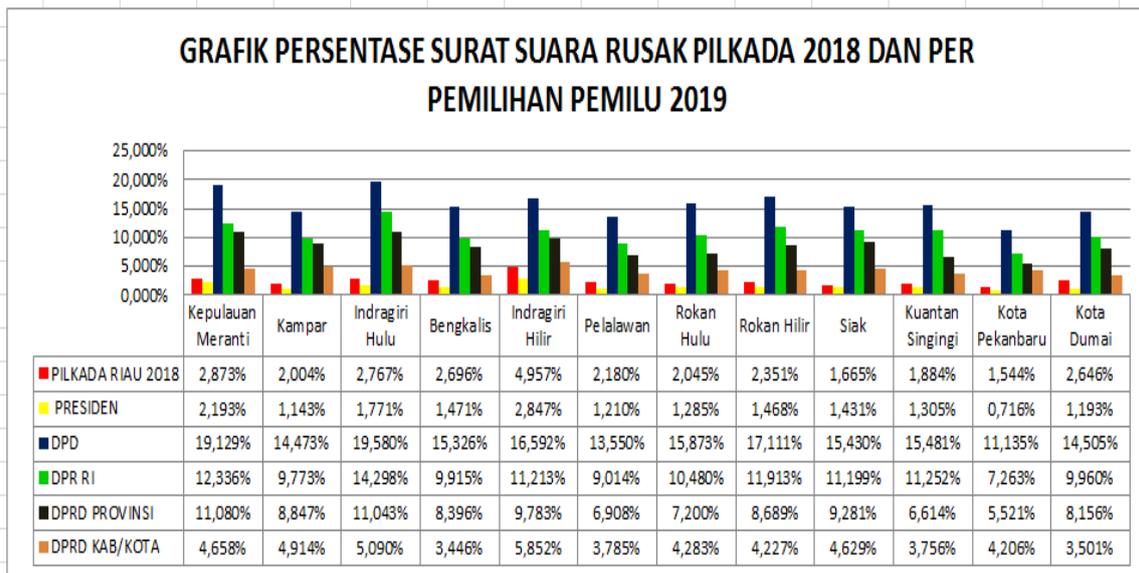
Tabel 1.3 Daftar Persentase Suara tidak sah pada Pemilu 2019

No	Nama Kabupaten	Persentase Surat Suara tidak sah				
		Pemilihan Presiden	Pemilihan DPD	Pemilihan DPR RI	Pemilihan DPRD Provinsi	Pemilihan DPRD Kab/Kota
1	Kepulauan Meranti	2,19%	19,08%	12,30%	11,05%	4,65%
2	Kampar	1,14%	14,46%	9,76%	8,84%	4,91%
3	Indragiri Hulu	1,77%	19,57%	14,29%	11,03%	5,09%
4	Bengkalis	1,47%	15,23%	9,85%	8,34%	3,44%
5	Indragiri Hilir	2,85%	16,56%	11,19%	9,76%	5,85%
6	Pelalawan	1,21%	13,47%	8,97%	6,87%	3,78%
7	Rokan Hulu	1,28%	15,85%	10,47%	7,19%	4,28%
8	Rokan Hilir	1,47%	17,09%	11,90%	8,68%	4,22%
9	Siak	1,43%	15,42%	11,18%	9,27%	4,62%
10	Kuantan Singingi	1,31%	15,47%	11,24%	6,60%	3,75%
11	Kota Pekanbaru	0,72%	11,01%	7,20%	5,46%	4,20%
12	Kota Dumai	1,19%	14,50%	9,96%	8,15%	3,50%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Grafik 2.3

## Perbandingan Surat Suara tidak sah pada Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019



Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 Pemilu 2019

Berdasarkan paparan data tabel diatas, bisa kita lihat bahwa terdapat perolehan surat suara tidak sah yang cukup besar pada pemilu 2019. Persentase suara tidak sah tertinggi mulai pada level pemilihan DPD, kemudian DPR RI, dan DPRD Provinsi, sedangkan pada level pemilihan presiden tidak begitu signifikan angka surat suara yang rusak. Surat suara yang rusak pada pemilihan presiden hanya sampai 2,19 persen, ini merupakan yang tertinggi dan terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan pada level yang sama, angka surat suara tidak sah terendah terdapat di Kota Pekanbaru dengan hanya 0,72 persen.

Pada level pemilihan DPD, DPR RI, dan DPRD tercatat surat suara tidak sah tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu. Untuk wilayah Kepulauan Meranti, surat suara tidak sah pada pemilihan DPD menyentuh angka 19,08 persen, kemudian pada pemilihan DPR RI berkisar 12,30 persen, serta pada pemilihan DPRD provinsi sekitar 11,05 persen. Sedangkan di Kabupaten Indragiri Hulu, surat suara tidak sah padapemilihan DPD sebesar 19,57 persen, kemudian pada pemilihan DPR RI menyentuh angka 14,29 persen, dan pada pemilihan DPRD provinsi surat suara tidak sah sebesar 11,03 persen. Ini

menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian khusus pada jenis pemilihan presiden pada Pemilu serentak tahun 2019.

Persentase surat suara tidak sah terendah pada level pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi juga terlihat jelas di beberapa wilayah Kabupaten/Kota. Namun hanya di Kota Pekanbaru lah persentase surat suara terendah terjadi. Untuk surat suara tidak sah pada pemilihan DPD berkisar 11,01 persen, sedangkan pada level pemilihan DPR RI 7,20 persen dan 5,46 persen pada level pemilihan DPRD provinsi. Rendahnya angka persentase surat suara tidak sah di Kota Pekanbaru bisa saja karena karakter pemilih sudah sangat cerdas dalam memberikan hak suara. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat kota mendapatkan akses informasi yang cukup melalui berbagai sosialisai tentang mekanisme pemilihan dari berbagai pihak, terutama dari penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan temuan data di lapangan menunjukkan bahwa surat suara tidak sah bisa dikategorikan dalam beberapa pola. Pola surat suara tidak sah yang ditemukan yaitu pencoblosan ganda, surat suara kosong (tidak dicoblos) dan surat suara tidak sah karena faktor teknis. Pola-pola tertentu kemudian akan menunjukkan surat suara tidak sah disebabkan oleh faktor kesengajaan atau karena faktor kesalahan teknis pencoblosan oleh pemilih akibat kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pemilihan/pencoblosan dalam Pemilu.

Fenomena surat suara tidak sah dalam Pemilihan Umum 2019 merupakan bentuk dari budaya politik masyarakat. Perilaku pemilih semacam ini secara tidak langsung menggambarkan ekspresi politik masyarakat pemilih. Sehingga pola yang terbentuk dari setiap suara yang rusak atau tidak sah bisa diinterpretasikan berdasarkan analisis teoritik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa surat suara tidak sah atau kosong yang terjadi pada jenis pemilihan Legislatif dikarenakan masyarakat merasa kebingungan, terutama pada jenis

pemilihan DPD dan DPR RI. Pada jenis pemilihan tersebut, berdasarkan pengakuan masyarakat, mereka kebingungan menentukan pilihan karena calon yang tertera pada surat suara tidak mereka kenali dan terlalu banyak daftar calon.

### **3.1 Pola Pencoblosan Ganda pada Surat Suara**

Salah satu bentuk surat suara tidak sah dalam pemilu yaitu ditemukan pencoblosan ganda. Pola semacam ini terjadi pada setiap jenis pemilihan, namun pola pencoblosan ganda kebanyakan terjadi pada jenis pemilihan Legislatif. Beberapa kasus juga ditemukan pada jenis pemilihan presiden/wakil presiden. Hal ini disebabkan bisa karena faktor kesengajaan atau juga faktor pemahaman pemilih. Misalnya pencoblosan kedua pasangan calon (paslon) pada jenis pemilihan presiden bisa terjadi karena pemilih tidak menyukai kedua pasangan calon tersebut.

Berbeda dengan temuan surat suara tidak sah karena faktor teknis, yaitu akibat surat suara yang tidak dibuka secara sempurna sehingga pencoblosan menjadi ganda atau bahkan tercoblos dengan tidak sengaja. Hal ini diasumsikan terjadi pada pemilih lansia dan pemilih pemula, meskipun tidak terbuka kemungkinan hal semacam ini bisa dilakukan oleh pemilih yang berwawasan tinggi dan dari kalangan terdidik.

*Ada dua kemungkinan soal suara tidak sah, biasanya orang tua-tua susah dalam memilih terlebih pada pemilu 2019 agak ketat dalam pendampingan di bilik suara, yang kedua mungkin faktor emosional hingga nyoblos beberapa. Itu mungkin karna memperoleh "jasa" dari pihak sana dan dari pihak sini, mungkin ya begitu dari orang kampung kayak gitu. (Dewi, KPPS Kel. Bangsal Aceh)*

*Suara tidak sah, dominan pada DPRD kota, pilpres ada yang coblos ganda rata-rata hanya empat lembar pada pilpres, DPRD kota yang banyak. Mungkin*

*karna kebingungan masyarakat karna terlalu banyak nama. (Ali, KPPS Kel. Lubuk Gaung)*

*Terkait suara tidak sah, banyak dari yang pileg, orang pada kebingungan, itu membuat bingung. Terkadang tidak terbuka secara total sudah tercoblos sehingga tembus ke gambar yang lain. Surat suara tidak sah di pilpres lebih kecil karna hanya dua gambar, tapi ada juga yang nyoblos dua-dua. Kalau nyoblos karena main-main tidak ada. (Arhipen Yapatra, KPPS Kel. Sialang Munggu)*

*Yang di coblos dua kali ada, ada yang sengaja juga ada, ya karena mereka tidak punya pilihan.. yang rusak itu lah yang milih dua kali mungkin karena tidak ada pilihan. Dan surat suara tidak sah bisa langsung dilihat saat penghitungan suara.(H.Asril Sidi Basa, KPPS Kel. Simpang Baru)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita bisa melihat bahwa pola pencoblosan ganda pada surat suara bisa terjadi karena faktor disengaja atau juga karena kurangnya pemahaman pemilih terhadap mekanisme pencoblosan yang telah ditetapkan oleh KPU. Perlu menjadi catatan kedepan untuk perbaikan bahwa, bagi pemilih lansia tentu dibutuhkan pendampingan serta panduan oleh penyelenggara pemilu supaya dalam memberikan hak pilih sesuai dengan ketentuan agar suara mereka tidak terbuang sia-sia karena surat sura rusak akibat tidak teliti dalam proses pencoblosan di bilik suara.

### **3.2 Pola Surat Suara Kosong**

Pola surat suara kosong yang dibiarkan dan tidak dicoblos juga ditemukan dalam beberapa kasus. Hal semacam ini bisa juga dikategorikan sebagai bentuk golput (golongan putih) meski si pemilih hadir dan memilih jenis-jenis pemilihan tertentu. Golput semacam ini menarik karena terjadi pada jenis pemilihan tertentu meski Pemilu dilakukan secara serentak.

Surat suara kosong atau dibiarkan saja tidak dicoblos kebanyakan pada jenis surat suara pemilihan anggota Legislatif. Salah satu alasan yang dominan muncul yaitu karena terlalu banyak calon pada surat suara sehingga membingungkan para pemilih terutama bagi pemilih lansia (lanjut usia) atau usia sepuh.

Berikut ini beberapa hasil wawancara dengan masyarakat pemilih terkait fenomena surat suara kosong yang tidak dicoblos oleh pemilik hak suara:

*Suara tidak sah rendah, entah tiga atau dua, pilgub entah lima. Pola rusak itu bukan faktor teknis tapi entah suka semua atau tidak suka semua, bahkan ada salah satu yang tidak di coblos sama sekali. (Gunardi, KPPS Kel.)*

*Suara tidak sah, persisnya saya lupa cuman tidak terlalu banyak sekitar lima sampai delapan gitu lah kiranya. Surat suara tidak sah kebanyakan di Pileg, DPD atau apa lah gitu, Pileg itu karna sebenarnya ada juga yang unsur sengaja dan ada juga yang lipatannya kurang dibuka jadi coblosnya dobel, kebanyakan faktor teknis/cara kurang membentang surat suara, kalo faktor sengaja mungkin satu-dua ada. (Perdiman, KPPS Kel. Sialang Munggu)*

*Surat suara tidak sah banyak di pileg dan bahkan ada yang tidak memilih karna hanya memilih presiden dan DPRD saja, yang lain kosong enggak dipilih karna tidak dikenal oleh warga, dan foto juga kecil, dan bilik suara kita juga tempatnya agak gelap. (H. Asril Sidi Basa, KPPS Kel. Simpang Baru)*

Pengakuan masyarakat pemilih tentang surat suara kosong yang diabaikan membuktikan bahwa ini bentuk ekspresi politik masyarakat. Keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih pada beberapa jenis pemilihan pada Pemilu serentak tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat enggan memilih karena para kandidat/calon yang berkontestasi tidak memperkenalkan diri kepada masyarakat. Selain itu juga, bentuk surat

suara yang begitu besar untuk jenis pemilihan Anggota Legislatif dianggap membingungkan masyarakat pemilih.

### **3.3 Surat Suara tidak sah: Bentuk *Protest Voting***

Jika kita lihat berdasarkan data persentase suara tidak sah dan pengakuan masyarakat, maka surat suara tidak sah pada terjadi pada jenis pemilihan Legislatif. Menurut pengakuan masyarakat, hal ini disebabkan karna faktor terlalu banyak calon dari setiap jenis pemilihan sehingga membuat masyarakat kebingungan. Selain itu, surat suara tidak sah ini bisa dibaca sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam Pemilu. Oleh karena itu, pola surat suara tidak sah semacam ini jelas merupakan sikap *protest voting* oleh masyarakat dalam pemilu 2019. Berdasarkan analisis teoritik, sikap semacam ini merupakan bentuk ekspresi pemilih, tujuannya untuk memprotes hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum tersebut. Sarasan protes dalam konteks ini biasanya ialah para kandidat, tim sukses, sistem pemilu, dan bahkan sistem politik secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengekspresikan pandangan politik yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan cara yang berbeda.

Kebanyakan dari protes pemilih ditujukan kepada para kandidat dan sistem Pemilu. Untuk para kandidat misalnya, karena masyarakat tidak kenal dan diabaikan oleh para kandidat maka ekspresi masyarakat terhadap hak pilihnya yaitu tidak mencoblos surat suara dan bahkan mencoblos beberapa kali (coblos ganda). Dalam hal ini, bagaimanapun aktif sosialisasi yang dilakkukan oleh pihak penyelenggara pemilu namun tidak diikuti oleh semangat yang sama oleh pada kandidat dan tim pemenangan maka hasrat masyarakat untuk hadir di bilik suara untuk menggunakan hak suaranya tidak akan terjadi. Selain itu, fenomena semacam ini juga bisa dianggap sebagai bentuk protes para pemilih terhadap sistem Pemilu yang terjadi sekarang, dimana masyarakat merasa pemilihan serentak semacam ini sangat melelahkan dan membingungkan, melelahkan bagi penyelenggara Pemilu dan membingungkan bagi para pemilih sebagai pengguna hak suara.

### C. Argumentasi Teoritis

Secara teoritis penyebab meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 terkonfirmasi dengan temuan data di lapangan. Hanya saja perbedaan persentase partisipasi pemilih pada setiap jenis pemilihan tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena faktor pemilihan kali ini dilakukan secara serentak. Peran media massa dan gaung politik yang menjadi penyebab angka partisipasi pemilih meningkat di Provinsi Riau. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada Riau tahun 2018, gaung politik dan dinamika opini publik yang berkembang di media massa dan media sosial tidak begitu bergairah bagi masyarakat pemilih, hal ini disebabkan masyarakat terlanjur kecewa dengan para pemimpin di tingkat Provinsi yang cenderung abai terhadap kebutuhan masyarakat umum. Sehingga memilih untuk tidak terlibat aktif dalam memberikan hak suara pada Pilkada 2018 menunjukkan bahwa ini merupakan bagian dari ekspresi kekecewaan pemilih (*protest voting*).

Selain itu, korelasi jangkauan kehadiran kontestan (beserta tim pemenangan) dengan partisipasi pemilih pada tingkat TPS juga mempengaruhi semangat masyarakat pemilih. Pada Pemilu 2019, kehadiran berbagai tim pemenangan calon yang berkontestasi terutama dari kalangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota begitu intens dalam “menyapa” masyarakat pemilih, sehingga hal ini juga sangat mempengaruhi tingkat kehadiran masyarakat ke bilik suara. Sedangkan antusiasme tinggi pada pemilihan presiden lebih karena gaung politik dan peran media massa. Jika berkaca pada kontestasi Pilkada 2018 di Riau, jangkauan kehadiran kontestan atau tim pemenangan tidak menyentuh hingga pelosok desa. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan partisipasi masyarakat rendah untuk hadir di bilik suara.

Berkecenderungan dengan sikap *protest voting*, ekspresi tersebut juga ditemukan pada Pemilu serentak tahun 2019. Kebanyakan sikap protes itu terjadi pada jenis pemilihan Legislatif,

karena masyarakat merasa pemilihan semacam ini sungguh membingungkan para pemilih terutama bagi pemilih lansia. Surat sura kosong dan pencoblosan ganda ditemukan di beberapa TPS di Provinsi Riau. Alasan dibalik surat suara tidak sah bisa karena pengetahuan pemilih yang minim tentang mekanisme pemilihan atau memang ini murni bagian dari ekspresi *protest voting* pemilik hak suara.

## **V. PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis teoritik yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Terdapat perbedaan partisipasi pemilih diantara setiap jenis pemilihan pada Pemilu 2019 namun tidak begitu signifikan. Meski begitu, perbedaan yang terjadi ini karena masyarakat cenderung lebih antusias memilih presiden dan Anggota Dewan pada level DPRD Kabupaten dibandingkan dengan memilih DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi. Pemilih langsung menerima 5 kartu suara menjadi penjelasan kondisi tidak ada perbedaan partisipasi pemilih yang signifikan diantara jenis pemilu 2019
2. Perbedaan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada Riau 2018 sangat signifikan. Antusiasme yang rendah pada Pilkada Riau 2018 disebabkan masyarakat merasa selama ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka meski telah berganti gubernur beberapa kali, sehingga masyarakat pun sedikit banyak apatis dengan pemilihan gubernur kala itu. Selain itu juga, masyarakat merasa tidak terlalu mengenal sosok calon gubernur yang akan mereka pilih dikarenakan minimnya kampanye kepada masyarakat sehingga masyarakat di beberapa wilayah pelosok tidak mendapat informasi yang cukup tentang sosok calon yang akan mereka pilih. Sedangkan faktor tingginya partisipasi pemilu 2019 dikarenakan kinerja penyelenggara pemilu berpadu dengan efek pemilihan presiden yang berimbas pada peningkatan untuk jenis pemilihan yang lain. Masyarakat merasa presiden merupakan sosok yang membawa dampak langsung kepada kelangsungan hidup mereka melalui kebijakan politiknya, sehingga masyarakat merasa perlu terlibat lebih aktif jika tidak ingin jagoan mereka kalah dalam pemilu. Terlebih akses informasi yang diperoleh masyarakat tentang pemilu kali ini intens beredar di berbagai media *mainstream*

seperti TV, Radio, Koran dan tentunya di media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram dan kanal Youtube.

3. Angka surat suara tidak sah pada pemilu tahun 2019 di provinsi Riau bervariasi pada masing-masing jenis pemilu 2019. Ini disebabkan beberapa faktor baik teknis pemilihan ataupun non-teknis. Masih minimnya pengetahuan pemilih tentang tata cara memilih yang benar berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU berakibat lanjut membingungkan pemilih pada jenis pemilihan Anggota Legislatif karena terlalu banyak calon. Disamping itu suara tidak sah ditengarai sebagai akibat kesengajaan, seperti sengaja dicoblos ganda pada pemilihan presiden dan dicoblos secara acak dan banyak pada pemilihan yang lain. Hal semacam ini bisa dikategorikan sebagai jenis *protest voting* atau bentuk protes pemilih dalam pemilu.

## **B. Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan kepada pihak penyelenggara pemilu yaitu:

1. Terkait kesenjangan persentase pemilih pada Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018, maka tugas penyelenggara berkenaan dengan sosialisasi harus ditingkatkan. Terutama di daerah-daerah Kabupaten/Kota yang jauh dari ibukota provinsi, sosialisasi di daerah tersebut harus menjadi prioritas karena akses informasi yang mereka peroleh terbatas.
2. KPU harus responsif terhadap keadaan di lapangan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak penyelenggara di lapangan (PPK dan KPPS), seperti kekurangan Surat Suara di beberapa TPS pada saat hari pemilihan.
3. Sehubungan banyak Surat Suara Tidak Sah, pihak penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU) harus lebih menggiatkan sosialisasi tentang mekanisme pencoblosan kepada para pemilih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal**

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Afan. *Menampung Partisipasi Politik*. JSP, Volum 1 No , Juli 1997. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

George Sorensen. 1993. *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Heywood, Andrew. 2014. *Politik* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Huda, Khairil, dkk.2018. *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 Nomor 3 Tahun 2018

Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mas'ood, Mochtar & Colin MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Scruton, Roger. 2013. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ramadhanil, Fadli, dkk. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan perludem.

Vickery, Chad. 2011. *Pedoman Untuk Memahami, menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (Terjemahan)*. Amerika Serikat: IFES.

### Website/Internet

Tribun News. 2019. *Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Riau 77,5 persen, Bawaslu: Banyak hak tidak terakomodir* <https://www.google.com/amp/s/pekanbaru.tribunnews.com/amp/2019/05/24/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-di-riau-775-persen-bawaslu-banyak-hak-memilih-tidak-terakomodir> Diakses tanggal 20 September 2019 pukul 08.12

Republika.co.id. 2019. *Korban Penyelenggara Pemilu Meninggal di Riau Bertambah*. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pqgayi328> Diakses tanggal 20 September 2019 pukul 08.47

Kompas.com. KPU sebut partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 capai 81 persen. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen> diakses pada tanggal 10 September 2019

Medcom.id. Partisipasi pemilih meningkat drastis di Pemilu 2019. <https://www.google.com/amp/s/www.medcom.id/amp/1bVyM1N-partisipasi-pemilih-meningkat-drastis-di-pemilu-2019> diakses pada tanggal 8 September 2019

Antarnews.com. Partisipasi Pemilu 2019 di Riau capai 78 persen. <https://riau.antarnews.com/berita/118082/partisipasi-pemilu-2019-di-riau-capai-78-persen> diakses pada tanggal 8 September 2019

Kompas.com. Persentase partisipasi Pilkada 2019 Papua tertinggi, Riau dan Kaltim Terendah.  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/12/23504431/persentase-partisipasi-pilkada-2019-papua-tertinggi-riau-dan-kaltim-terendah>  
Diakses pada tanggal 11 September 2019

## Lampiran 1

### 1. Tabel Hasil Pemilihan Gubernur Riau 2018

No	KABUPATEN	Pilkada Riau 2018		
		DPT	Penguna Hak Pilih	Surat Suara tidak sah
1	Kepulauan Meranti	135.461	76.622	2.201
2	Kampar	449.804	255.590	5.123
3	Indragiri Hulu	270.512	139.703	3.865
4	Bengkalis	363.873	193.994	5.231
5	Indragiri Hilir	448.503	270.476	13.408
6	Pelalawan	193.622	118.510	2.584
7	Rokan Hulu	310.627	183.099	3.745
8	Rokan Hilir	372.645	220.079	5.174
9	Siak	267.380	161.634	2.691
10	Kuantan Singingi	214.156	122.569	2.309
11	Kota Pekanbaru	497.880	309.514	4.779
12	Kota Dumai	174.249	94.342	2.496

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018

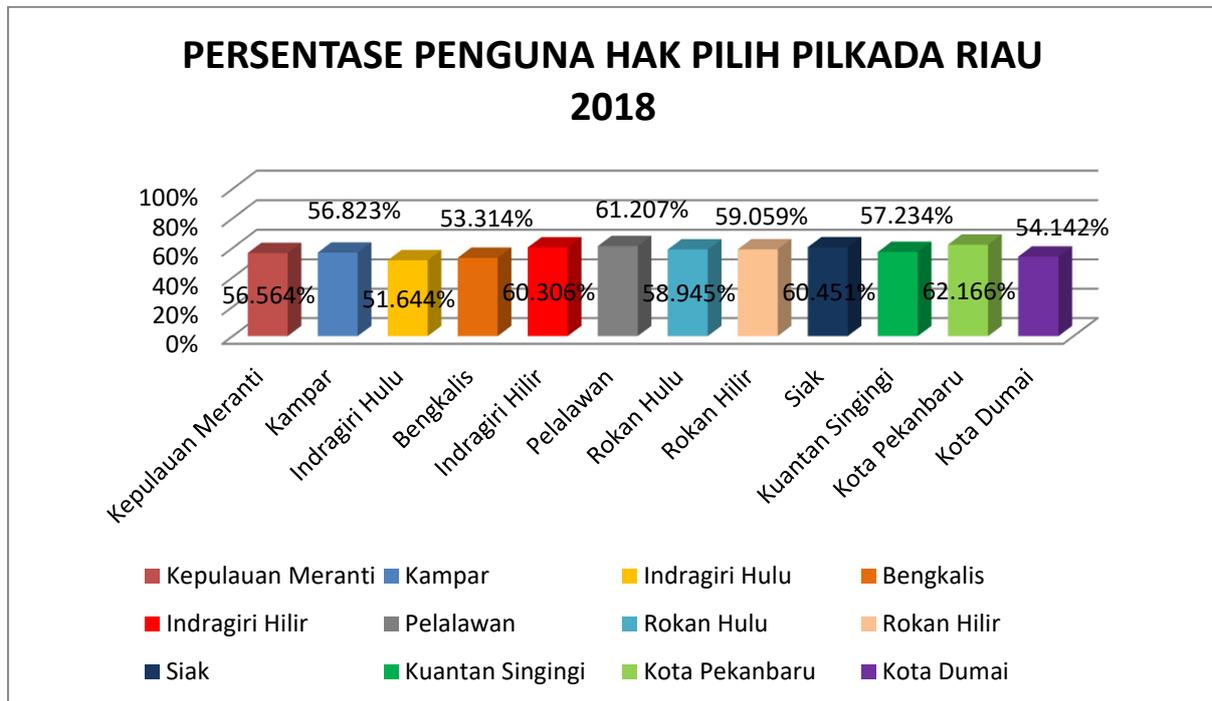
#### 1.1 Tabel Persentase Penguna Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Riau 2018

No	KABUPATEN	PERSENTASE PENGUNA HAK PILIH
1	Kepulauan Meranti	56,564%
2	Kampar	56,823%
3	Indragiri Hulu	51,644%
4	Bengkalis	53,314%
5	Indragiri Hilir	60,306%
6	Pelalawan	61,207%
7	Rokan Hulu	58,945%
8	Rokan Hilir	59,059%
9	Siak	60,451%
10	Kuantan Singingi	57,234%
11	Kota Pekanbaru	62,166%
12	Kota Dumai	54,142%

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018

## Lampiran 1

### 1.2 Grafik Persentase Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Riau 2018



Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018

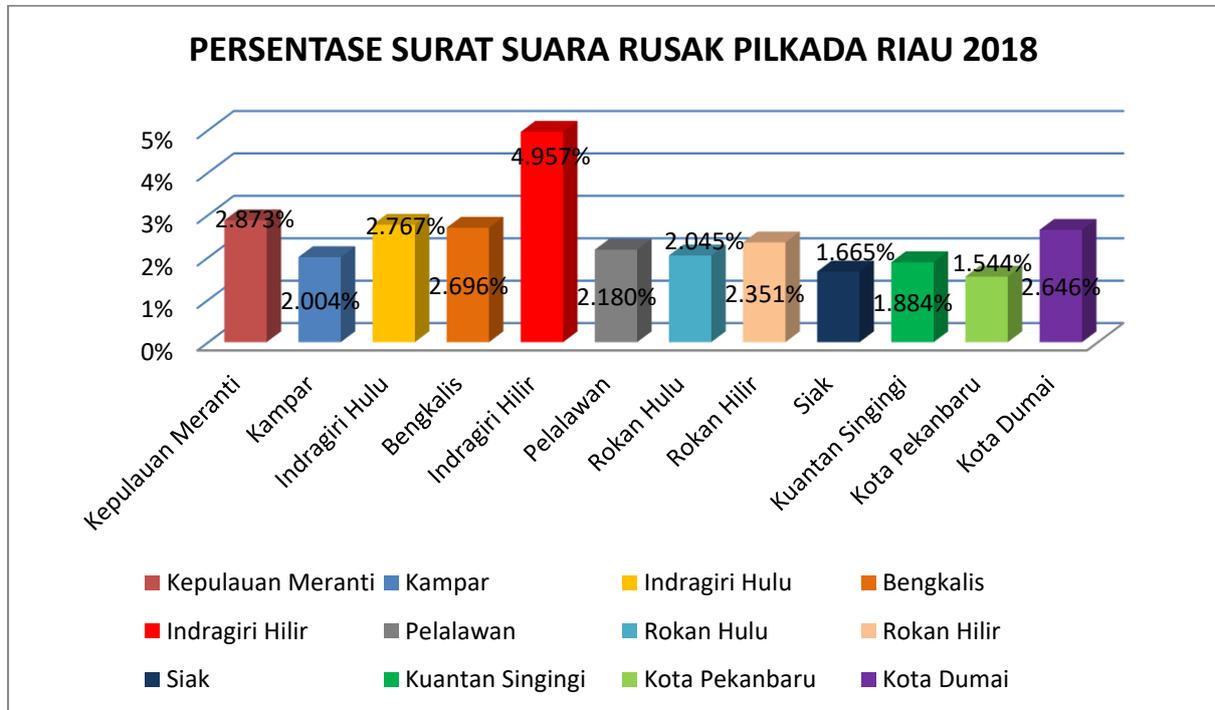
### 1.3 Tabel Persentase Surat Suara tidak sah Pada Pemilihan Gubernur Riau 2018

No	KABUPATEN	PERSENTASE SURAT SUARA TIDAK SAH
1	Kepulauan Meranti	2,873%
2	Kampar	2,004%
3	Indragiri Hulu	2,767%
4	Bengkalis	2,696%
5	Indragiri Hilir	4,957%
6	Pelalawan	2,180%
7	Rokan Hulu	2,045%
8	Rokan Hilir	2,351%
9	Siak	1,665%
10	Kuantan Singingi	1,884%
11	Kota Pekanbaru	1,544%
12	Kota Dumai	2,646%

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018

## Lampiran 1

### 1.4 Grafik Persentase Surat Suara tidak sah Pada Pemilihan Gubernur Riau 2018



Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018

### 2. Tabel Hasil Rata-Rata Pemilihan Umum 2019

No	KABUPATEN	PEMILU 2019		
		RATA - RATA		
		DPT	Penguna Hak Pilih	Surat Suara tidak sah
1	Kepulauan Meranti	147.517	105.900	10.460
2	Kampar	510.475	409.116	32.102
3	Indragiri Hulu	301.342	239.035	24.753
4	Bengkalis	412.262	319.977	24.646
5	Indragiri Hilir	491.150	346.592	32.080
6	Pelalawan	226.417	182.691	12.584
7	Rokan Hulu	339.328	276.109	21.598
8	Rokan Hilir	417.327	318.222	27.624
9	Siak	297.161	233.626	19.606
10	Kuantan Singingi	232.018	189.922	14.588
11	Kota Pekanbaru	611.093	478.017	27.521
12	Kota Dumai	199.963	160.067	11.948

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

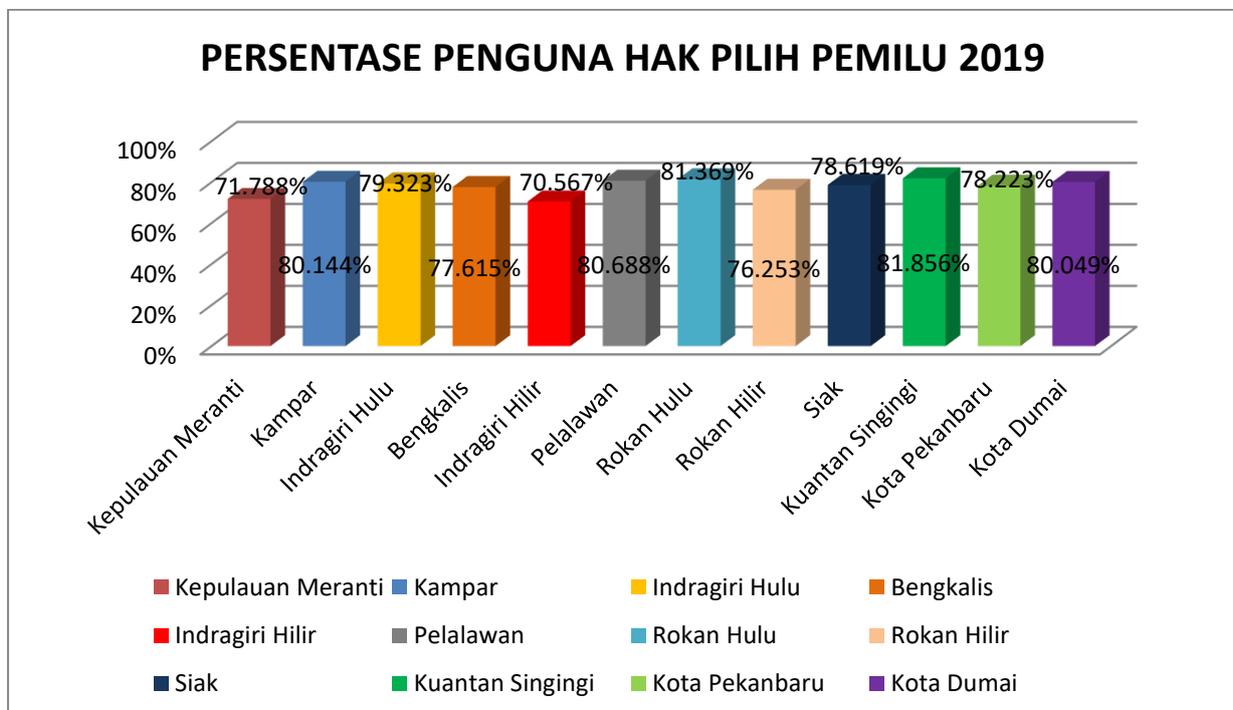
## Lampiran 1

2.1 Tabel Persentase Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum 2019

No	KABUPATEN	PEMILU 2019
		RATA - RATA
		PERSENTASE PENGGUNA HAK PILIH
1	Kepulauan Meranti	71,788%
2	Kampar	80,144%
3	Indragiri Hulu	79,323%
4	Bengkalis	77,615%
5	Indragiri Hilir	70,567%
6	Pelalawan	80,688%
7	Rokan Hulu	81,369%
8	Rokan Hilir	76,253%
9	Siak	78,619%
10	Kuantan Singingi	81,856%
11	Kota Pekanbaru	78,223%
12	Kota Dumai	80,049%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

2.2 Grafik Persentase Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum 2019



Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

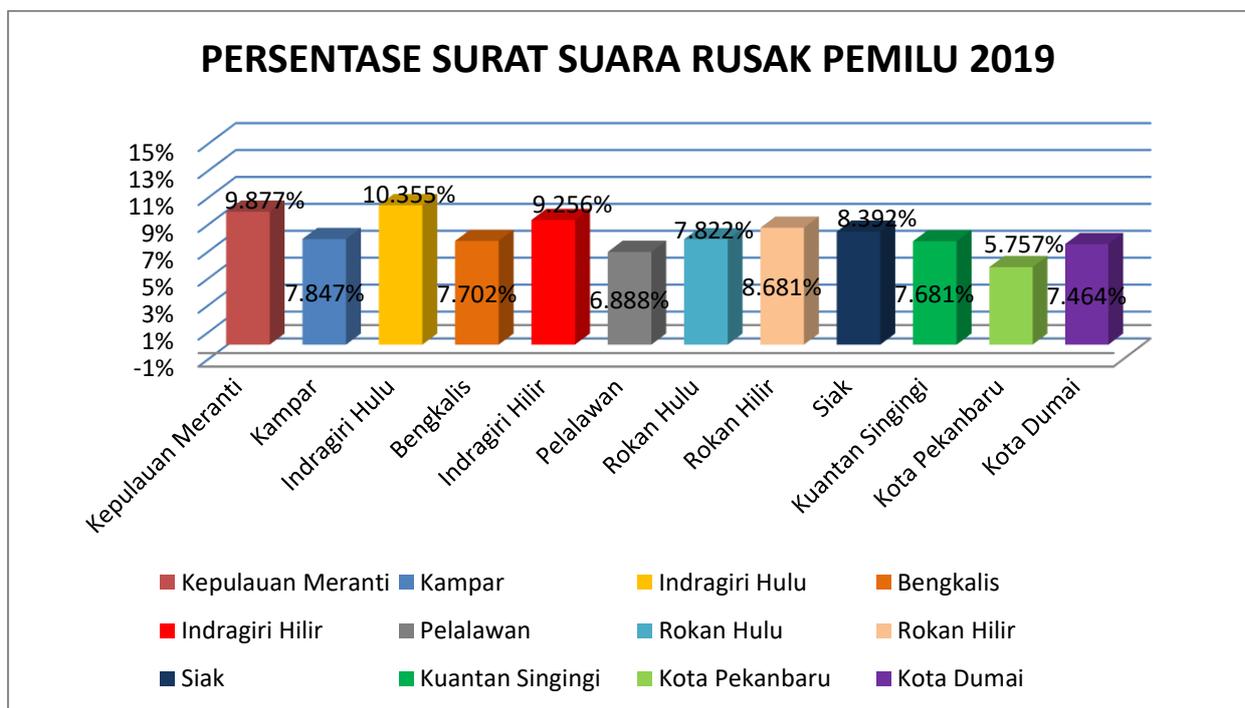
## Lampiran 1

2.3 Tabel Persentase Surat Suara tidak sah Pemilihan Umum 2019

No	KABUPATEN	PEMILU 2019
		RATA - RATA
		PERSENTASE SURAT SUARA TIDAK SAH
1	Kepulauan Meranti	9,877%
2	Kampar	7,847%
3	Indragiri Hulu	10,355%
4	Bengkalis	7,702%
5	Indragiri Hilir	9,256%
6	Pelalawan	6,888%
7	Rokan Hulu	7,822%
8	Rokan Hilir	8,681%
9	Siak	8,392%
10	Kuantan Singingi	7,681%
11	Kota Pekanbaru	5,757%
12	Kota Dumai	7,464%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

2.4 Grafik Persentase Surat Suara tidak sah Pemilihan Umum 2019



Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Lampiran 1

3. Tabel Hasil Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	PEMILU 2019														
		PRESIDEN			DPD			DPR RI			DPRD PROVINSI			DPRD KAB/KOTA		
		DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah
1	Kepulauan Meranti	147.517	106.181	2.329	147.517	105.907	20.259	147.517	105.859	13.059	147.517	105.869	11.730	147.517	105.684	4.923
2	Kampar	510.475	412.067	4.711	510.475	411.573	59.565	510.475	411.602	40.225	510.475	411.599	36.415	510.475	398.739	19.594
3	Indragiri Hulu	301.342	239.190	4.235	301.342	239.054	46.806	301.342	238.999	34.171	301.342	238.972	26.389	301.342	238.958	12.163
4	Bengkalis	412.262	321.644	4.730	412.262	319.546	48.974	412.262	319.574	31.685	412.262	319.560	26.829	412.262	319.560	11.012
5	Indragiri Hilir	491.150	347.179	9.884	491.150	346.568	57.504	491.150	346.618	38.866	491.150	346.463	33.893	491.150	346.130	20.255
6	Pelalawan	226.417	183.598	2.222	226.417	182.564	24.737	226.417	182.613	16.460	226.417	182.478	12.605	226.417	182.203	6.896
7	Rokan Hulu	339.328	276.455	3.552	339.328	276.038	43.816	339.328	276.059	28.932	339.328	276.005	19.871	339.328	275.987	11.821
8	Rokan Hilir	417.327	318.531	4.677	417.327	318.218	54.451	417.327	318.203	37.908	417.327	318.130	27.643	417.327	318.030	13442
9	Siak	297.161	233.809	3.345	297.161	233.654	36.053	297.161	233.483	26.147	297.161	233.418	21.663	297.161	233.764	10822
10	Kuantan Singingi	232.018	190.142	2.482	232.018	189.955	29.407	232.018	189.879	21.365	232.018	189.861	12.558	232.018	189.771	7.128
11	Kota Pekanbaru	611.093	482.116	3.452	611.093	476.809	53.091	611.093	477.688	34.695	611.093	476.650	26.316	611.093	476.820	20.053
12	Kota Dumai	199.963	160.168	1.911	199.963	160.136	23.227	199.963	160.142	15.950	199.963	160.073	13.055	199.963	159.818	5.595

## Lampiran 1

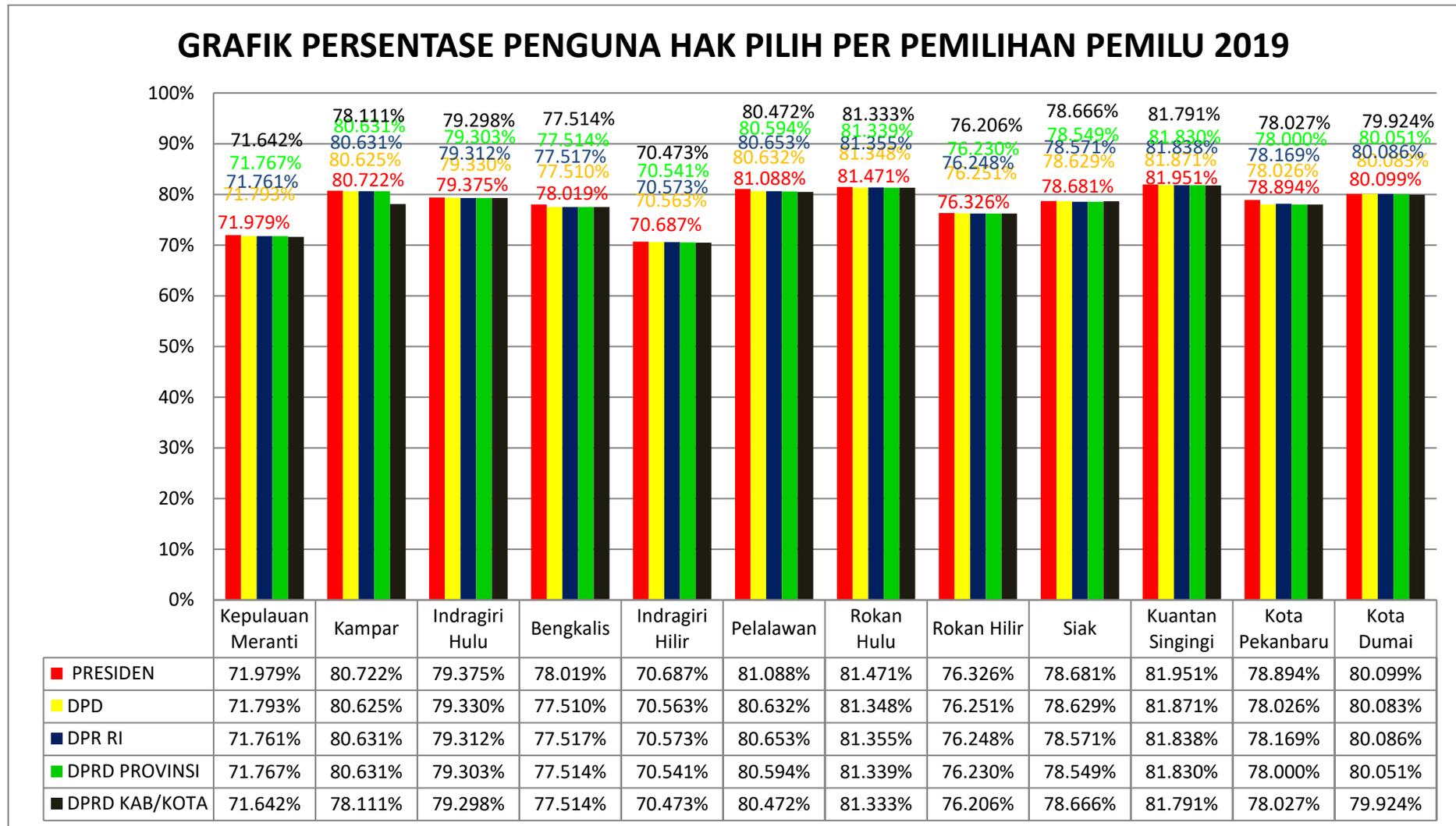
3.1 Tabel Persentase Pengguna Hak Suara Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
1	Kepulauan Meranti	71,979%	71,793%	71,761%	71,767%	71,642%
2	Kampar	80,722%	80,625%	80,631%	80,631%	78,111%
3	Indragiri Hulu	79,375%	79,330%	79,312%	79,303%	79,298%
4	Bengkalis	78,019%	77,510%	77,517%	77,514%	77,514%
5	Indragiri Hilir	70,687%	70,563%	70,573%	70,541%	70,473%
6	Pelalawan	81,088%	80,632%	80,653%	80,594%	80,472%
7	Rokan Hulu	81,471%	81,348%	81,355%	81,339%	81,333%
8	Rokan Hilir	76,326%	76,251%	76,248%	76,230%	76,206%
9	Siak	78,681%	78,629%	78,571%	78,549%	78,666%
10	Kuantan Singingi	81,951%	81,871%	81,838%	81,830%	81,791%
11	Kota Pekanbaru	78,894%	78,026%	78,169%	78,000%	78,027%
12	Kota Dumai	80,099%	80,083%	80,086%	80,051%	79,924%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

## Lampiran 1

### 3.1 Grafik Persentase Pengguna Hak Suara Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan



## Lampiran 1

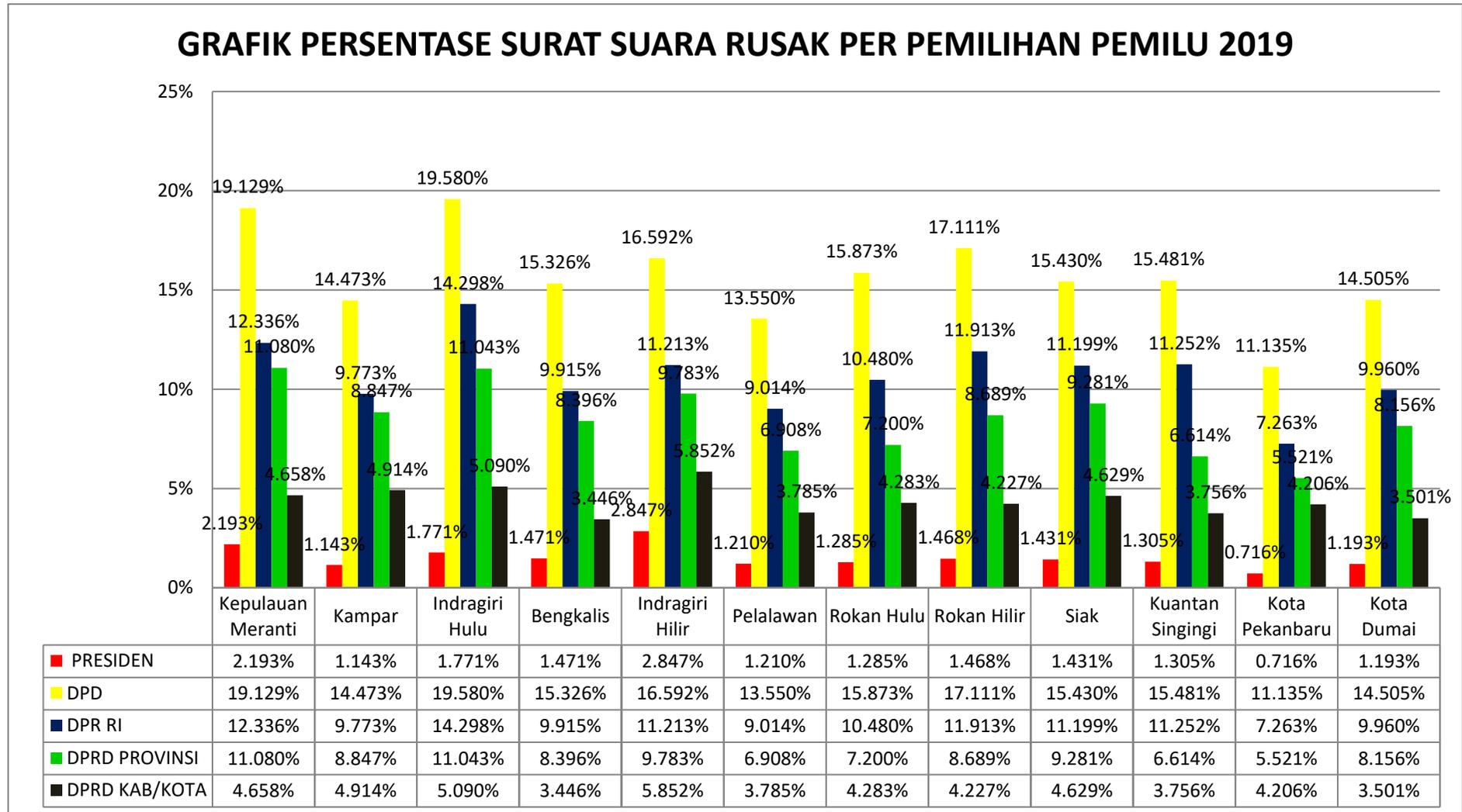
3.3 Tabel Persentase Surat Suara tidak sah Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
1	Kepulauan Meranti	2,193%	19,129%	12,336%	11,080%	4,658%
2	Kampar	1,143%	14,473%	9,773%	8,847%	4,914%
3	Indragiri Hulu	1,771%	19,580%	14,298%	11,043%	5,090%
4	Bengkalis	1,471%	15,326%	9,915%	8,396%	3,446%
5	Indragiri Hilir	2,847%	16,592%	11,213%	9,783%	5,852%
6	Pelalawan	1,210%	13,550%	9,014%	6,908%	3,785%
7	Rokan Hulu	1,285%	15,873%	10,480%	7,200%	4,283%
8	Rokan Hilir	1,468%	17,111%	11,913%	8,689%	4,227%
9	Siak	1,431%	15,430%	11,199%	9,281%	4,629%
10	Kuantan Singingi	1,305%	15,481%	11,252%	6,614%	3,756%
11	Kota Pekanbaru	0,716%	11,135%	7,263%	5,521%	4,206%
12	Kota Dumai	1,193%	14,505%	9,960%	8,156%	3,501%

Sumber : Olahan Data Hasil Pemilu 2019

Lampiran 1

3.4 Grafik Persentase Surat Suara tidak sah Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan



Lampiran 1

4. Tabel Perbandingan Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Rata-Rata Pemilihan Umum 2019

No	KABUPATEN	Pilkada Riau 2018			PEMILU 2019		
					RATA - RATA		
		DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah
1	Kepulauan Meranti	135.461	76.622	2.201	147.517	105.900	10.460
2	Kampar	449.804	255.590	5.123	510.475	409.116	32.102
3	Indragiri Hulu	270.512	139.703	3.865	301.342	239.035	24.753
4	Bengkalis	363.873	193.994	5.231	412.262	319.977	24.646
5	Indragiri Hilir	448.503	270.476	13.408	491.150	346.592	32.080
6	Pelalawan	193.622	118.510	2.584	226.417	182.691	12.584
7	Rokan Hulu	310.627	183.099	3.745	339.328	276.109	21.598
8	Rokan Hilir	372.645	220.079	5.174	417.327	318.222	27.624
9	Siak	267.380	161.634	2.691	297.161	233.626	19.606
10	Kuantan Singingi	214.156	122.569	2.309	232.018	189.922	14.588
11	Kota Pekanbaru	497.880	309.514	4.779	611.093	478.017	27.521
12	Kota Dumai	174.249	94.342	2.496	199.963	160.067	11.948

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019

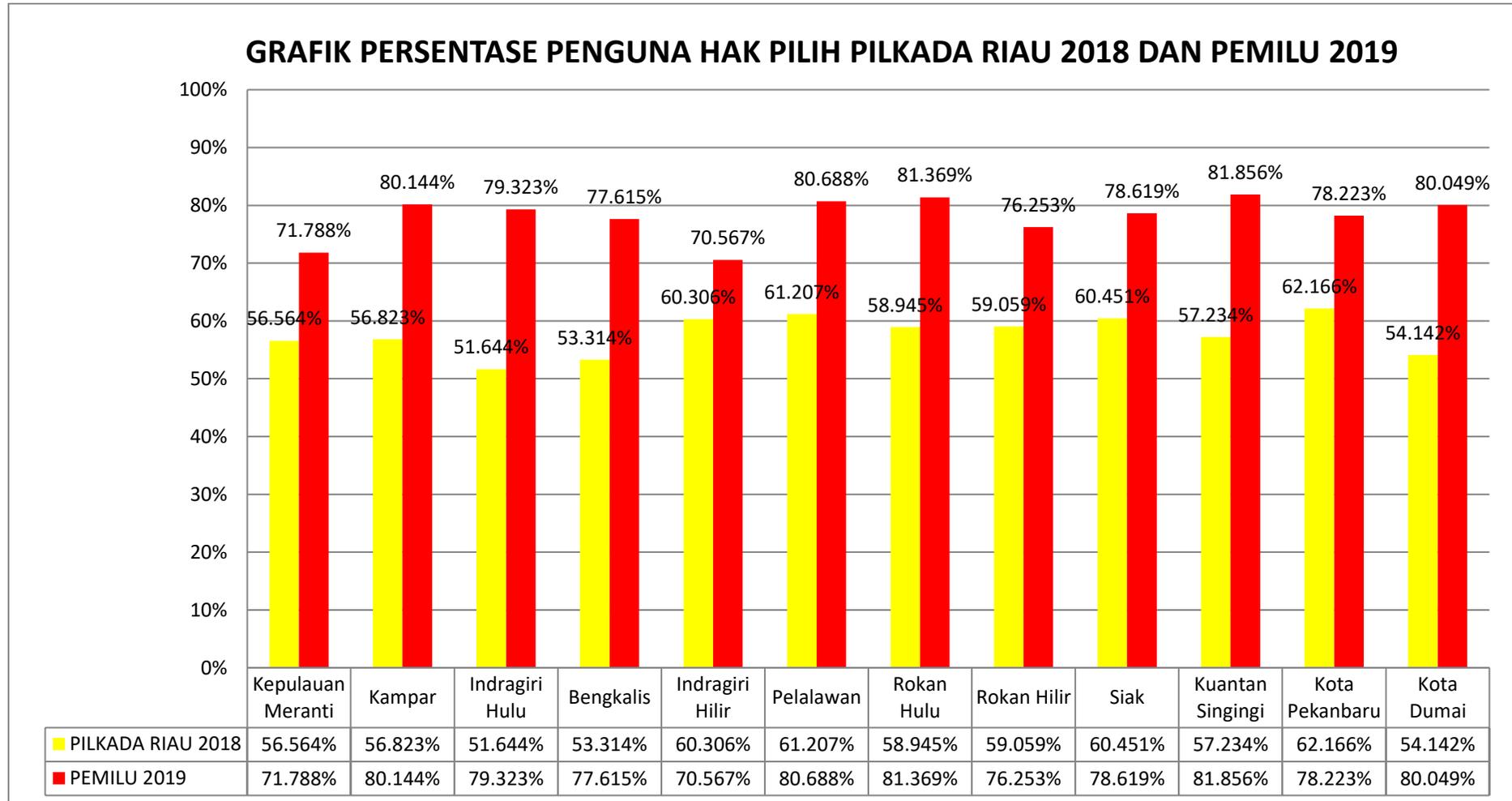
## Lampiran 1

4.1 Tabel Persentase Perbandingan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Rata-Rata Pemilihan Umum 2019

No	RIAU	PERSENTASE PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE PENGGUNA HAK PILIH
	KABUPATEN	PILKADA RIAU 2018	PEMILU 2019
1	Kepulauan Meranti	56,564%	71,788%
2	Kampar	56,823%	80,144%
3	Indragiri Hulu	51,644%	79,323%
4	Bengkalis	53,314%	77,615%
5	Indragiri Hilir	60,306%	70,567%
6	Pelalawan	61,207%	80,688%
7	Rokan Hulu	58,945%	81,369%
8	Rokan Hilir	59,059%	76,253%
9	Siak	60,451%	78,619%
10	Kuantan Singingi	57,234%	81,856%
11	Kota Pekanbaru	62,166%	78,223%
12	Kota Dumai	54,142%	80,049%

Lampiran 1

4.2 Grafik Persentase Perbandingan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Rata-Rata Pemilihan Umum 2019



## Lampiran 1

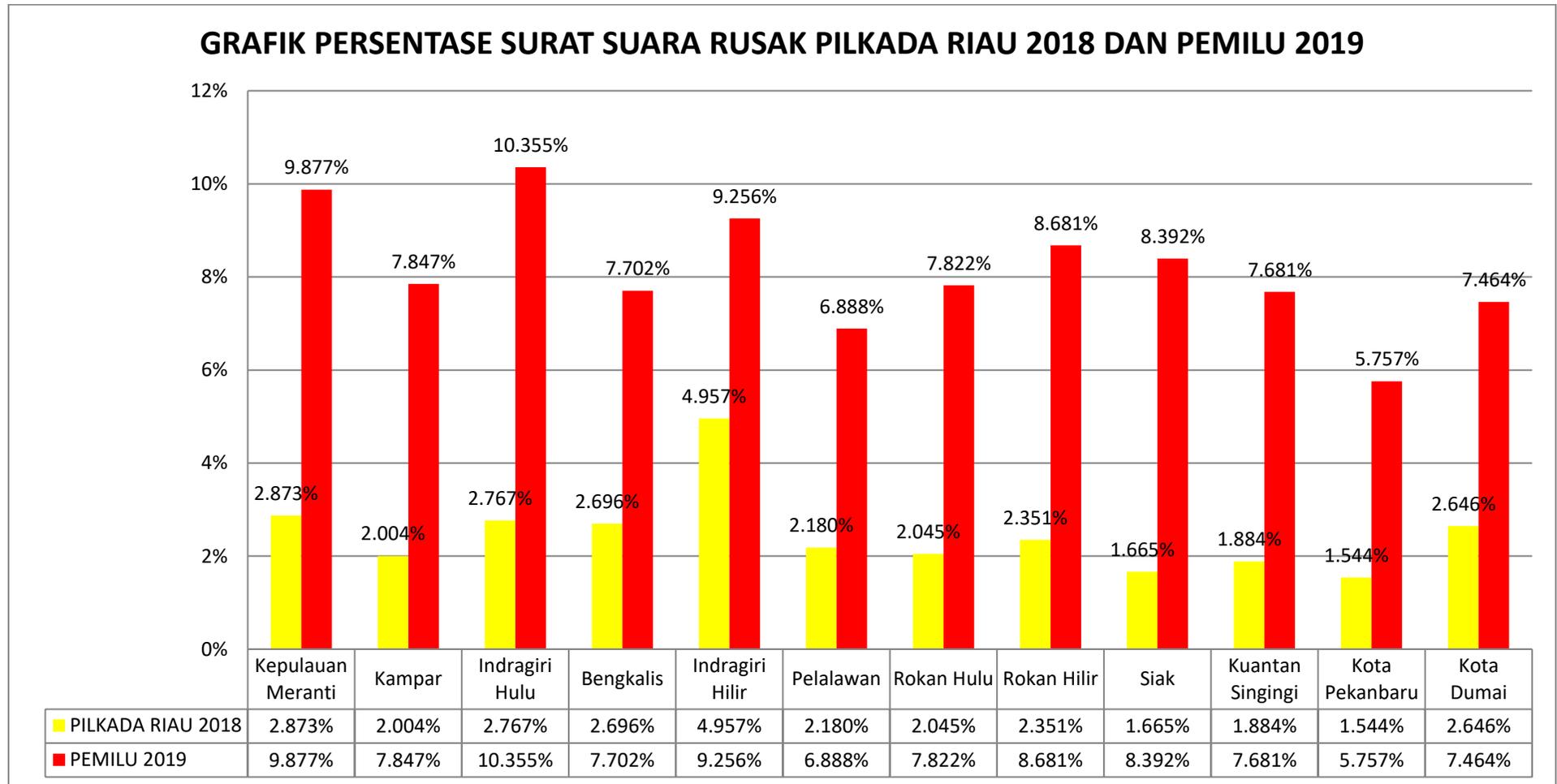
4.3 Tabel Persentase Perbandingan Surat Suara tidak sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Rata-Rata Pemilihan Umum 2019

No	RIAU	SURAT SUARA TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK SAH
	KABUPATEN	PILKADA RIAU 2018	PEMILU 2019
1	Kepulauan Meranti	2,873%	9,877%
2	Kampar	2,004%	7,847%
3	Indragiri Hulu	2,767%	10,355%
4	Bengkalis	2,696%	7,702%
5	Indragiri Hilir	4,957%	9,256%
6	Pelalawan	2,180%	6,888%
7	Rokan Hulu	2,045%	7,822%
8	Rokan Hilir	2,351%	8,681%
9	Siak	1,665%	8,392%
10	Kuantan Singingi	1,884%	7,681%
11	Kota Pekanbaru	1,544%	5,757%
12	Kota Dumai	2,646%	7,464%

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019

Lampiran 1

4.4 Grafik Persentase Perbandingan Surat Suara tidak sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Rata-Rata Pemilihan Umum 2019



Lampiran 1

5. Tabel Perbandingan Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	Pilkada Riau 2018			PEMILU 2019														
					PRESIDEN			DPD			DPR RI			DPRD PROVINSI			DPRD KAB/KOTA		
		DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah	DPT	Pemilih	Surat Suara tidak sah
1	Kepulauan Meranti	135.461	76.622	2.201	147.517	106.181	2.329	147.517	105.907	20.259	147.517	105.859	13.059	147.517	105.869	11.730	147.517	105.684	4.923
2	Kampar	449.804	255.590	5.123	510.475	412.067	4.711	510.475	411.573	59.565	510.475	411.602	40.225	510.475	411.599	36.415	510.475	398.739	19.594
3	Indragiri Hulu	270.512	139.703	3.865	301.342	239.190	4.235	301.342	239.054	46.806	301.342	238.999	34.171	301.342	238.972	26.389	301.342	238.958	12.163
4	Bengkalis	363.873	193.994	5.231	412.262	321.644	4.730	412.262	319.546	48.974	412.262	319.574	31.685	412.262	319.560	26.829	412.262	319.560	11.012
5	Indragiri Hilir	448.503	270.476	13.408	491.150	347.179	9.884	491.150	346.568	57.504	491.150	346.618	38.866	491.150	346.463	33.893	491.150	346.130	20.255
6	Pelalawan	193.622	118.510	2.584	226.417	183.598	2.222	226.417	182.564	24.737	226.417	182.613	16.460	226.417	182.478	12.605	226.417	182.203	6.896
7	Rokan Hulu	310.627	183.099	3.745	339.328	276.455	3.552	339.328	276.038	43.816	339.328	276.059	28.932	339.328	276.005	19.871	339.328	275.987	11.821
8	Rokan Hilir	372.645	220.079	5.174	417.327	318.531	4.677	417.327	318.218	54.451	417.327	318.203	37.908	417.327	318.130	27.643	417.327	318.030	13442
9	Siak	267.380	161.634	2.691	297.161	233.809	3.345	297.161	233.654	36.053	297.161	233.483	26.147	297.161	233.418	21.663	297.161	233.764	10822
10	Kuantan Singingi	214.156	122.569	2.309	232.018	190.142	2.482	232.018	189.955	29.407	232.018	189.879	21.365	232.018	189.861	12.558	232.018	189.771	7.128
11	Kota Pekanbaru	497.880	309.514	4.779	611.093	482.116	3.452	611.093	476.809	53.091	611.093	477.688	34.695	611.093	476.650	26.316	611.093	476.820	20.053
12	Kota Dumai	174.249	94.342	2.496	199.963	160.168	1.911	199.963	160.136	23.227	199.963	160.142	15.950	199.963	160.073	13.055	199.963	159.818	5.595

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019

Lampiran 1

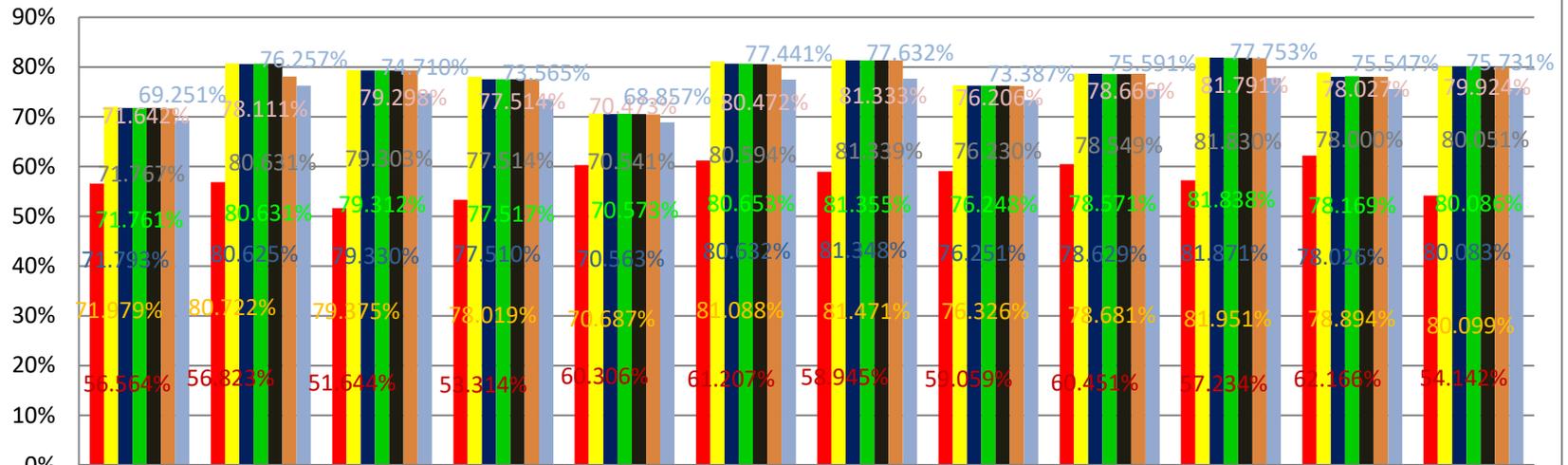
5.1 Tabel Persentase Perbandingan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	PILKADA RIAU 2018	PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
1	Kepulauan Meranti	56,564%	71,979%	71,793%	71,761%	71,767%	71,642%
2	Kampar	56,823%	80,722%	80,625%	80,631%	80,631%	78,111%
3	Indragiri Hulu	51,644%	79,375%	79,330%	79,312%	79,303%	79,298%
4	Bengkalis	53,314%	78,019%	77,510%	77,517%	77,514%	77,514%
5	Indragiri Hilir	60,306%	70,687%	70,563%	70,573%	70,541%	70,473%
6	Pelalawan	61,207%	81,088%	80,632%	80,653%	80,594%	80,472%
7	Rokan Hulu	58,945%	81,471%	81,348%	81,355%	81,339%	81,333%
8	Rokan Hilir	59,059%	76,326%	76,251%	76,248%	76,230%	76,206%
9	Siak	60,451%	78,681%	78,629%	78,571%	78,549%	78,666%
10	Kuantan Singingi	57,234%	81,951%	81,871%	81,838%	81,830%	81,791%
11	Kota Pekanbaru	62,166%	78,894%	78,026%	78,169%	78,000%	78,027%
12	Kota Dumai	54,142%	80,099%	80,083%	80,086%	80,051%	79,924%

Lampiran 1

5.2 Grafik Persentase Perbandingan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

### GRAFIK PENGUNA HAK PILIH PILKADA RIAU 2018 DAN PEMILU PER PEMILIHAN 2019



	Kepulauan Meranti	Kampar	Indragiri Hulu	Bengkalis	Indragiri Hilir	Pelalawan	Rokan Hulu	Rokan Hilir	Siak	Kuantan Singingi	Kota Pekanbaru	Kota Dumai
■ PILKADA RIAU 2018	56.564%	56.823%	51.644%	53.314%	60.306%	61.207%	58.945%	59.059%	60.451%	57.234%	62.166%	54.142%
■ PRESIDEN	71.979%	80.722%	79.375%	78.019%	70.687%	81.088%	81.471%	76.326%	78.681%	81.951%	78.894%	80.099%
■ DPD	71.793%	80.625%	79.330%	77.510%	70.563%	80.632%	81.348%	76.251%	78.629%	81.871%	78.026%	80.083%
■ DPR RI	71.761%	80.631%	79.312%	77.517%	70.573%	80.653%	81.355%	76.248%	78.571%	81.838%	78.169%	80.086%
■ DPRD PROVINSI	71.767%	80.631%	79.303%	77.514%	70.541%	80.594%	81.339%	76.230%	78.549%	81.830%	78.000%	80.051%
■ DPRD KAB/KOTA	71.642%	78.111%	79.298%	77.514%	70.473%	80.472%	81.333%	76.206%	78.666%	81.791%	78.027%	79.924%
■ Rata - Rata	69.251%	76.257%	74.710%	73.565%	68.857%	77.441%	77.632%	73.387%	75.591%	77.753%	75.547%	75.731%

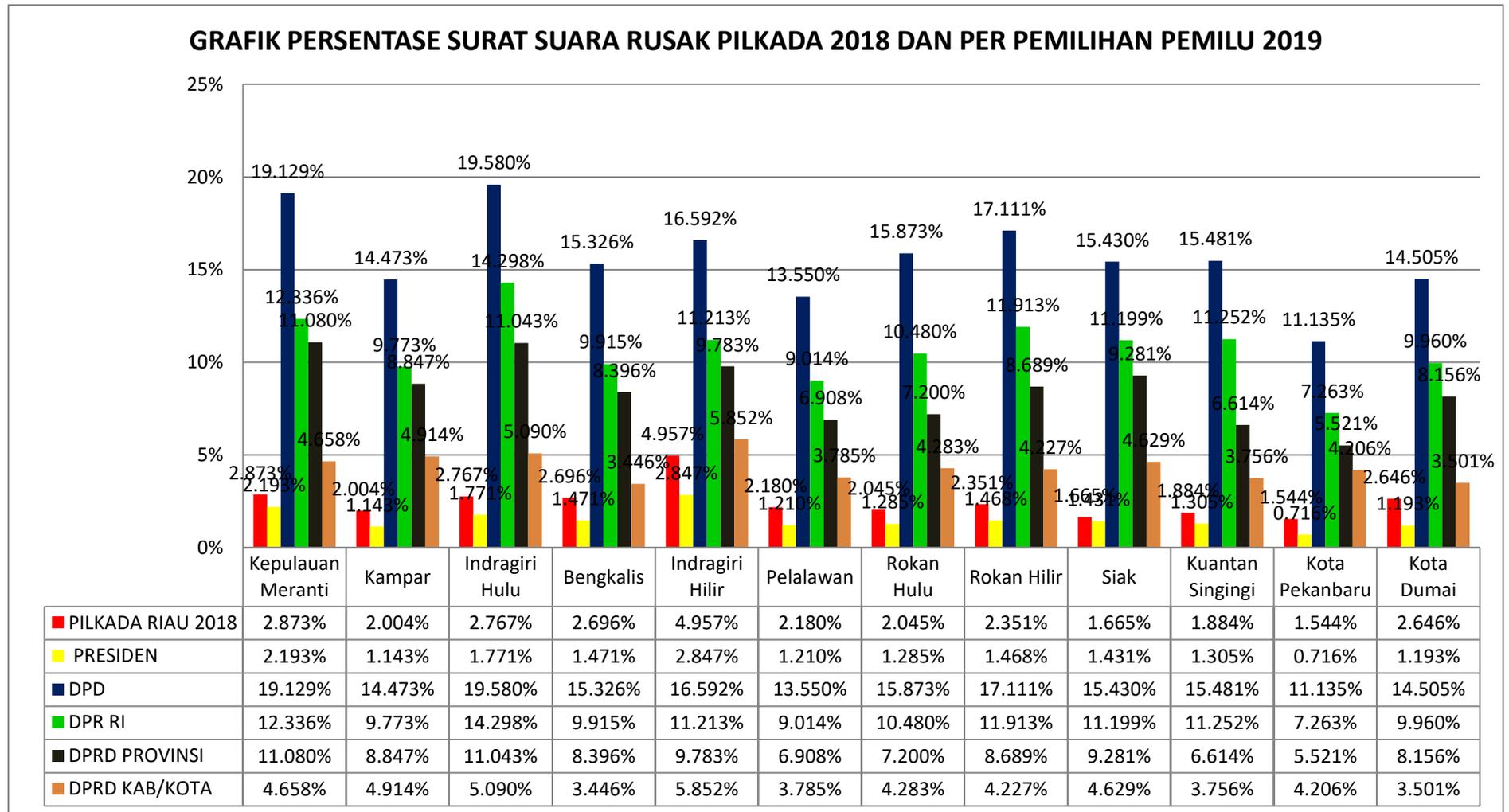
## Lampiran 1

5.3 Tabel Persentase Perbandingan Surat Suara tidak sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	PILKADA RIAU 2018	PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
1	Kepulauan Meranti	2,873%	2,193%	19,129%	12,336%	11,080%	4,658%
2	Kampar	2,004%	1,143%	14,473%	9,773%	8,847%	4,914%
3	Indragiri Hulu	2,767%	1,771%	19,580%	14,298%	11,043%	5,090%
4	Bengkalis	2,696%	1,471%	15,326%	9,915%	8,396%	3,446%
5	Indragiri Hilir	4,957%	2,847%	16,592%	11,213%	9,783%	5,852%
6	Pelalawan	2,180%	1,210%	13,550%	9,014%	6,908%	3,785%
7	Rokan Hulu	2,045%	1,285%	15,873%	10,480%	7,200%	4,283%
8	Rokan Hilir	2,351%	1,468%	17,111%	11,913%	8,689%	4,227%
9	Siak	1,665%	1,431%	15,430%	11,199%	9,281%	4,629%
10	Kuantan Singingi	1,884%	1,305%	15,481%	11,252%	6,614%	3,756%
11	Kota Pekanbaru	1,544%	0,716%	11,135%	7,263%	5,521%	4,206%
12	Kota Dumai	2,646%	1,193%	14,505%	9,960%	8,156%	3,501%

Lampiran 1

5.4 Grafik Persentase Perbandingan Surat Suara tidak sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan



Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019

Lampiran 1

6. Tabel Perbandingan Surat Suara sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

No	KABUPATEN	Pilkada Riau 2018	PEMILU 2019				
			PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
		Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah
1	Kepulauan Meranti	74.421	103.852	85.648	92.800	94.139	100.761
2	Kampar	250.467	407.356	352.008	371.377	375.184	379.145
3	Indragiri Hulu	135.838	234.955	192.248	204.828	212.583	226.795
4	Bengkalis	188.763	316.914	270.572	287.889	292.731	308.548
5	Indragiri Hilir	257.068	337.295	289.064	307.752	312.570	325.875
6	Pelalawan	115.926	181.376	157.827	166.153	169.873	175.307
7	Rokan Hulu	179.354	272.903	232.222	247.127	256.134	264.166
8	Rokan Hilir	214.905	313.854	263.767	280.295	290.487	304.588
9	Siak	158.943	230.464	197.601	207.336	211.755	222.942
10	Kuantan Singingi	120.260	187.660	160.548	168.514	177.303	182.643
11	Kota Pekanbaru	304.735	478.664	423.718	442.993	450.334	456.767
12	Kota Dumai	91.846	158.257	136.909	144.192	147.018	154.223

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019

Lampiran 1

6.1 Tabel Persentase Perbandingan Surat Suara sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

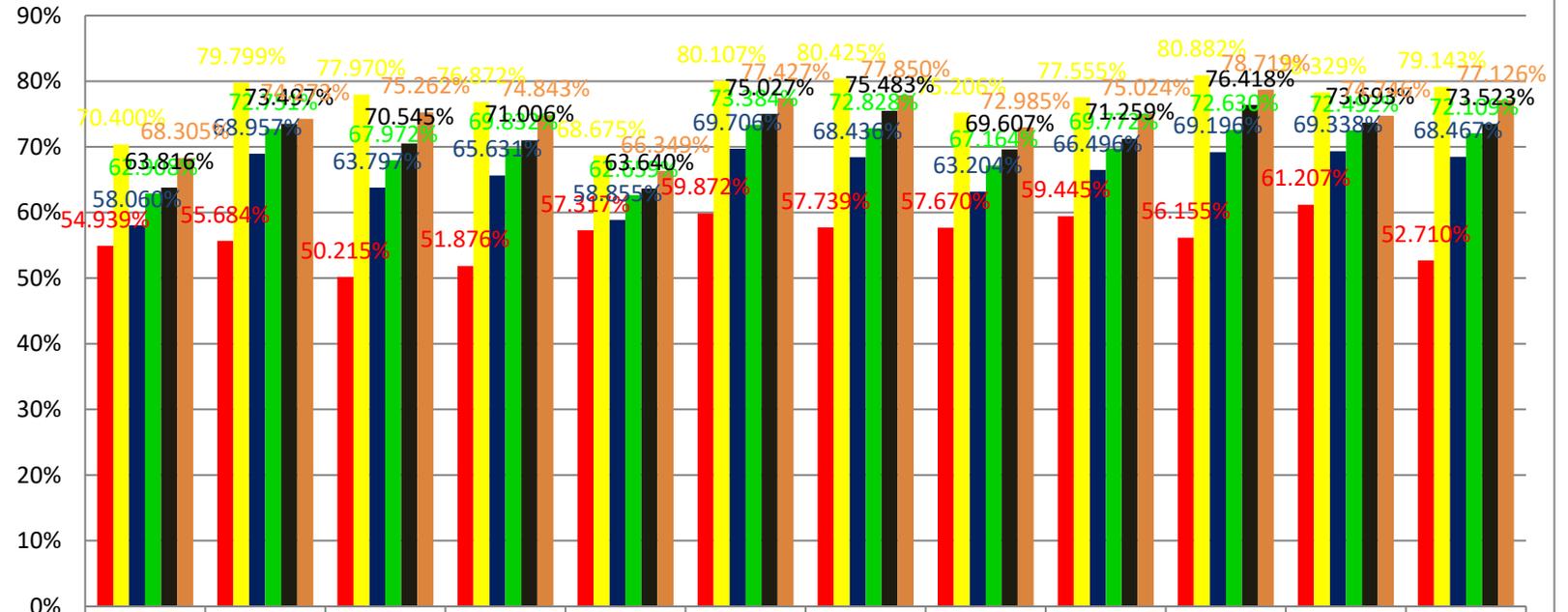
No	KABUPATEN	Pilkada Riau 2018	PEMILU 2019				
			PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
		Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah	Surat Suara Sah
1	Kepulauan Meranti	54,939%	70,400%	58,060%	62,908%	63,816%	68,305%
2	Kampar	55,684%	79,799%	68,957%	72,751%	73,497%	74,273%
3	Indragiri Hulu	50,215%	77,970%	63,797%	67,972%	70,545%	75,262%
4	Bengkalis	51,876%	76,872%	65,631%	69,832%	71,006%	74,843%
5	Indragiri Hilir	57,317%	68,675%	58,855%	62,659%	63,640%	66,349%
6	Pelalawan	59,872%	80,107%	69,706%	73,384%	75,027%	77,427%
7	Rokan Hulu	57,739%	80,425%	68,436%	72,828%	75,483%	77,850%
8	Rokan Hilir	57,670%	75,206%	63,204%	67,164%	69,607%	72,985%
9	Siak	59,445%	77,555%	66,496%	69,772%	71,259%	75,024%
10	Kuantan Singingi	56,155%	80,882%	69,196%	72,630%	76,418%	78,719%
11	Kota Pekanbaru	61,207%	78,329%	69,338%	72,492%	73,693%	74,746%
12	Kota Dumai	52,710%	79,143%	68,467%	72,109%	73,523%	77,126%

Sumber : Olahan Data Hasil Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019

Lampiran 1

6.2 Grafik Persentase Perbandingan Surat Suara sah Pemilihan Gubernur Riau 2018 Dengan Pemilihan Umum 2019 Per-Pemilihan

**GRAFIK PERSENTASE SURAT SUARA RUSAK PILKADA 2018 DAN PER PEMILIHAN PEMILU 2019**



	Kepulauan Meranti	Kampar	Indragiri Hulu	Bengkalis	Indragiri Hilir	Pelalawan	Rokan Hulu	Rokan Hilir	Siak	Kuantan Singingi	Kota Pekanbaru	Kota Dumai
■ Pilkada Riau 2018	54.939%	55.684%	50.215%	51.876%	57.317%	59.872%	57.739%	57.670%	59.445%	56.155%	61.207%	52.710%
■ PEMILU 2019 PRESIDEN	70.400%	79.799%	77.970%	76.872%	68.675%	80.107%	80.425%	75.206%	77.555%	80.882%	78.329%	79.143%
■ PEMILU 2019 DPD	58.060%	68.957%	63.797%	65.631%	58.855%	69.706%	68.436%	63.204%	66.496%	69.196%	69.338%	68.467%
■ PEMILU 2019 DPR RI	62.908%	72.751%	67.972%	69.832%	62.659%	73.384%	72.828%	67.164%	69.772%	72.630%	72.492%	72.109%
■ PEMILU 2019 DPRD PROVINSI	63.816%	73.497%	70.545%	71.006%	63.640%	75.027%	75.483%	69.607%	71.259%	76.418%	73.693%	73.523%
■ PEMILU 2019 DPRD KAB/KOTA	68.305%	74.273%	75.262%	74.843%	66.349%	77.427%	77.850%	72.985%	75.024%	78.719%	74.746%	77.126%

## Lampiran 2

### Daftar nama informan penelitian

No	Nama Informan	Kapasitas
1	Januardi	PPS Sialang Munggu
2	H. Asril Sidi Basa	KPPS, TPS 08 Simpang Baru
3	Perdiman	KPPS, TPS 02 Sialang Munggu
4	Arhipen Yapatra	KPPS, TPS 14 Sialang Munggu
5	Muhammad Amin	Anggota PPK Batang Gangsal
6	Hotman Hendrik Sitompul	KPPS, TPS 10 Batang Gangsal
7	Rio Saputra	KPPS, TPS 05 Batang Gngsal
8	Suriadi	KPPS, TPS 04 Batang Gangsal
9	Agus Nedi	Anggota PPK Sungai Sembilan
10	Jamil	Ketua PPK Sungai Sembilan
11	Dewi	KPPS, TPS Bangsal aceh
12	Gunardi	KPPS, TPS 13 Tanjung Penyembal
13	Ambok Angka	KPPS, TPS 08 Bangsal Aceh
14	Ali Mundayat	KPPS, TPS 24 Lubuk Gaung

## Lampiran 2

Dokumentasi/Foto wawancara di lapangan



Keterangan: proses wawancara dengan anggota PPK Batang Gangsal (foto kiri) dan wawancara dengan Hotman KPPS Batang Gangsal (foto kanan)

## Lampiran 2



Keterangan: Foto diatas merupakan proses diskusi dan wawancara dengan PPK dan KPPS di dua wilayah yang berbeda, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu (foto atas) dan di Kota Dumai (foto bawah).